PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

PROFIL

DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

2020

: http://dinsos.bulelengkab.go.id

: dinsos@bulelengkab.go.id

: (0362) 21248

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puja syukur kami panjatkan kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNYA penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini memuat gambaran umum, kondisi geografis daerah Kabupaten Buleleng, perkembangan penduduk, ketenaga kerjaan dan kondisi makro sosial ekonomi yang secara keseluruhan akan mempengaruhi terhadap hasil penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dalam menunjang penanganan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan untuk semua keperluan baik sebagai informasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan yang berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan khususnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Buleleng.

Kami atas nama tim pelaksana kegiatan penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020 menyampaikan ucapan terima kasih karena selesainya penyusunan buku profil ini merupakan hasil kerja Tim dan masukan dari banyak pihak terkait diantaranya Bappeda Kabupaten Buleleng, Badan Pusat

Statistik Kabupaten Buleleng, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, Sekretariat dan Bidang Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Walaupun demikian kami sangat menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan agar kedepannya kami dapat menyusun profil dengan lebih baik.

Sekian dan Terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Singaraja, September 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 3

BAB II GAMBARAN UMUM **4**

2.1 KONDISI UMUM DAERAH 4
2.1.1 Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah 4
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 5
2.1.3 Topografi 6
2.1.4 Iklim 8
2.1.5 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Desa Adat 9

2.2 KEPENDUDUKAN 10
2.2.1 Jumlah Dan Persebaran Penduduk 10
2.2.2 Kepadatan Penduduk 11
2.2.3 Pertumbuhan Penduduk 12

2.3 INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI 14
2.3.1 Kemiskinan Makro Di Kabupaten Buleleng 14
2.3.2 Distribusi Pendapatan Penduduk 40% Terbawah 20
2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia 23

2.4 KETENAGAKERJAAN 25
2.4.1 Kondisi Umum Ketenagakerjaan Di Kabupaten Buleleng Dari Tahun 2014 – 2018 25
2.4.2 Jumlah Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng Tahun 2014 – 2018 26
2.4.3 Data Jumlah Perusahaan (Dunia Usaha) Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 – 2018 28

BAB III SUMBER DAYA 29

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 29
3.1.1 Visi dan Misi 29
3.1.2 Tujuan Dan Sasaran 30
3.1.3 Kebijakan 34

3.2 STRUKTUR ORGANISASI 35
3.2.1 Kondisi Umum Kepegawaian 37
3.2.2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 41
3.2.3 Kondisi Sarana Dan Prasarana 43

3.3 TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL 44

BAB IV DATA UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL 62

4.1 URUSAN
SOSIAL 6
24.2 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
62 .....4.3 JE
NIS-JENIS PELAYANAN DASAR DALAM PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 64
4.3.1 Anak Terlantar 64
4.3.2 Lanjut Usia Terlantar 65
4.3.3 Penyandang Disabilitas 65
4.3.4 Tuna Susila 66
4.3.5 Gelandangan 67

4.3.6 Pengemis 68
4.3.7 Korban Bencana Alam 68
4.3.8 Fakir Miskin 69

4.4 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS).... 71
4.4.1 Pekerja Sosial Profesional 72
4.4.2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 72
4.4.3 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 72
4.4.4 Lembaga Kesejahteraan Sosial Selanjutnya Disebut LKS ... 73
4.4.5 Karang Taruna 73
4.4.6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 74
4.4.7 Keluarga Pioner 74
4.4.8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) 74
4.4.9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 75
4.4.10 Penyuluh Sosial 75
4.4.11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Yang Selanjutnya Disebut TKSK 77
4.4.12 Dunia Usaha 77

BAB V PROFIL KESEJAHTERAAN SOSIAL 78

5.1 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN 78
5.1.1 Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 78
5.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan Pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 79

5.2 BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 83
5.2.1 Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 83
5.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 84

5.3 BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 93
5.3.1 Program dan Kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 93
5.3.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 93

5.4 UPTD MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN
101
5.4.1 Program dan Kegiatan UPTD Monumen dan Tugu

Perjuangan 10
1
5.4.2 Realisasi Program dan Kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
101

BAB VI PENUTUP
115

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Peta Wilayah Kabupaten Buleleng 4
2.2 Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Buleleng 6
2.3 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut 7
2.4 Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 9
2.5 Grafik Perkembangan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 11
2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng Periode Th. 2014-2018. 13
2.7 Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2013-2018 15
2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Buleleng Th. 2013-2018 16
2.9 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota se-Provinsi Bali Th. 2018. 17
2.10 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota di Prov. Bali Th. 2018 (Ribuan) 17
2.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2018 18
2.12 Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2018 19
2.13 Gini Rasio Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2018 22
2.14 Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2018 23
2.15 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2018 .. 24
2.16 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng 26
2.17 Data Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng 27
3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019 35

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

2.1 Pembagian Daerah Administrasi Di Kabupaten Buleleng Tahun 2019..... 5
2.2 Luas Dan Persebaran Kelas Lereng Di Kabupaten Buleleng 6
2.3 Perkembangan Keadaan Curah Hujan di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 8
2.4 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Desa Adat di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 9
2.5 Jumlah Perkembangan Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 10
2.6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2018..... 11
2.7 Penduduk Kabupaten Buleleng Menurut Umur Tahun 2014 - 2018 12
2.8 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng 25
2.9 Data Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng..... 27
2.10 Data Jumlah Dunia Usaha di Kabupaten Buleleng 28
3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022..... 31
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022..... 33
3.3 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 37
3.4 Daftar Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 38
3.5 Data PNS Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenis Kelamin 39
3.6 Data PNS Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan 39
3.7 Data Pegawai Kontrak Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin 40

3.8 Data Pegawai Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang

Pendidikan 40
3.9 Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Golongan 41
3.10 Data PNS UPT Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenis Kelamin 41
3.11 Data PNS UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan 42
3.12 Data PNS UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Golongan 42
3.13 Sarana dan Prasarana 43
4.1 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2018 63
4.2 Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 64
4.3 Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 65
4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 66
4.5 Jumlah Tuna Susila di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 66
4.6 Jumlah Gelandangan di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 67
4.7 Jumlah Pengemis di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 68
4.8 Jumlah Korban Bencana Alam di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 . 69
4.9 Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 70
4.10 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Buleleng Tahun 2018 71
5.1 Jumlah Keluarga Fakir Miskin Yang Memperoleh Bantuan Sosial Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 79
5.2 Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 81
5.3 Jumlah Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Buleleng Th. 2014 - 2018 .. 82
5.4 Jumlah Penerima Bantuan Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan di

Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 82
5.5 Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 84
5.6 Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 84
5.7 Jumlah Penerima Bantuan Untuk Lanjut Usia Terlantar di Kab. Buleleng Tahun 2014 - 2018 85
5.8 Data Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2018 (APBD) 85
5.9 Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kedisabilitasan di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 86
5.10 Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 88
5.11 Jumlah Penerima Bantuan dan Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 88
5.12 Data Penyandang Disbilitas Yang Menerima Bantuan Alat Bantu Tahun 2014 - 2018 89
5.13 Data Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2018 91
5.14 Jumlah Gelandangan Yang Dipulangkan Ke Daerah Asal Th. 2014 - 2018 . 91
5.15 Jumlah Pengemis Yang Di Razia Tim Yustisi dan Dipulangkan Ke Daerah Asal Tahun 2014 - 2018 92
5.16 Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 93
5.17 Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 94
5.18 Jumlah Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Bantuan Sosial di

Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018..... 97

5.19 Jumlah Korban Bencana Sosial Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018..... 97

5.20 Data Penerima Bantuan Santunan Kematian Masyarakat Miskin (SANTIMAS) Di Kabupaten Bueleleng Tahun 2014 - 2018 98

5.21 Data Keluarga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018..... 98

5.22 Data Keluarga Fakir Miskin Kabupaten Buleleng Yang Telah Memperoleh Bantuan KKS dan KIS Tahun 2014 - 2018..... 99

5.23 Data Taman Makam Pahlawan (TMP), Monumen dan Tugu Perjuangan Yang Diserahkan dan Dikelola Oleh Pemerintah Kab. Buleleng Th. 2018 101

5.24 Data Monumen dan Tugu Perjuangan Yang Belum Diserahkan dan Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat yang mencakup semua aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara menyeluruh yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.

Sistem kesejahteraan sosial nasional dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial menjamin terselenggaranya pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang berkualitas dengan tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga negara. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hal ini akan dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan penanganan masalah baik yang bersifat prioritas/utama maupun penunjang.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani pesatnya perkembangan masalah kesejahteraan sosial mendorong paradigma dengan mengedepankan peran pemerintah daerah serta masyarakat luas sebagai potensi yang perlu diperhitungkan. Untuk itulah Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk mengarahkan dan memformulasikan pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial sebagai konsekuensi tugas, pokok dan fungsi di Bidang Kesejahteraan Sosial. Di Kabupaten Buleleng masalah kesejahteraan sosial masih diwarnai dengan

banyaknya permasalahan sosial yang cukup tinggi diantaranya adalah masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh banyaknya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanganannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan urusan wajib atau yang berkaitan pelayanan dasar untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Sehubungan hal tersebut guna mengetahui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng baik dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial maka perlu disajikan data dan informasi dalam bentuk ***"Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng"***.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020 berpedoman pada :

1. Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng; dan
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 460 / 429 / HK / 2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini adalah tersedianya dokumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dan kebijakan Dinas Sosial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Sosial yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Mengetahui perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.
b. Tersedianya Informasi tentang program dan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta perkembangannya di Kabupaten Buleleng secara akurat dan terupdate.
c. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang nantinya dapat bermanfaat untuk bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan target sasaran dan program yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Luas, Batas Wilayah, dan Cakupan Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 km^2 atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Bali
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Jembrana
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Karangasem

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Buleleng

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2020

Secara administrasi wilayah Kabupaten Buleleng terdiri atas 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 169 Desa Pakraman. Ditinjau dari luas wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yaitu 356,57 km^2 atau 26,11% dari luas Kabupaten Buleleng. Sedangkan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Buleleng, yaitu 46,95 km^2 atau 3,44% dari luas Kabupaten Buleleng. Pembagian daerah administrasi Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Administrasi				Desa Pakraman	Luas Wilayah (km^2)
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Banjar	Lingkungan		
1	Gerokgak	14	-	77	-	14	35.657
2	Seririt	20	1	80	5	25	11.178
3	Busungbiu	15	-	41	-	16	19.662
4	Banjar	17	-	74	-	17	17.260
5	Sukasada	14	1	63	5	21	17.293
6	Buleleng	12	17	41	53	21	4.694
7	Sawan	14	-	69	-	18	9.252
8	Kubutambahan	13	-	52	-	22	11.824
9	Tejakula	10	-	60	-	15	9.768
Jumlah		129	19	557	63	169	136.588

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Buleleng, 2020

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8°03’40”-8°23’00” LS dan 114°25’55”- 115°27’28” BT, berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian selatan, sedangkan di bagian utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai *Nyegara Gunung*, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang menganut sistem hulu (*ulun*) dan hilir (*teben*).

2.1.3. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Buleleng dilihat dari kemiringan lereng terdapat kelas lahan datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Sebaran luasan kemiringan lereng terdapat di semua kecamatan, seperti tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Luas dan Persebaran Kelas Lereng di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah Lereng					Jumlah (Ha)
		0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Gerokgak	11.249,81	8.330,92	9.295,31	9.856,67	853,43	39.856,14
2	Seririt	1.761,58	2.517,65	4.057,80	3.700,74	0,00	12.037,77
3	Busungbiu	0,00	2.412,26	8.750,52	2.843,69	0,00	14.006,47
4	Banjar	886,90	825,07	9.275,13	2.598.86	105,34	13.691,30
5	Sukasada	397,08	1.436,18	3.992,71	1.788,16	394,89	7.939.02
6	Buleleng	3.731,07	885,96	0,00	0,00	0,00	4.617,03
7	Sawan	2.419,17	2.363,84	2.297,56	1.355,89	364,22	8.800,68
8	Kubutambahan	1.348,25	7,659,89	1.305,61	1.268,19	398,56	11.980.50
9	Tejakula	0,00	7.290,26	708,44	1.780,59	0,00	9.779,29
Jumlah		21.793,86	33.722,03	39.613,08	25.192,79	2.116,44	122.438,20

Sumber: DEM SRTM (Citra Landsat) Kementerian Kehutanan RI

Sementara itu, peta kemiringan lereng wilayah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2

Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Buleleng

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2011

Data pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 menunjukkan bahwa kondisi lahan Buleleng dominan berada pada kelas lereng antara 15-25%, atau 32,35% dari total luas lahan. Secara umum sebagian besar wilayah merupakan lahan berlereng karena posisi wilayah Kabupaten Buleleng yang berupa perbukitan di bagian selatan dan pantai di bagian utara (*Nyegara Gunung*). Kondisi topografi yang demikian perlu dikelola dengan baik karena menempatkan wilayah Buleleng berpotensi sebagai daerah rawan bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir bandang.

b. Ketinggian Tempat

Ditinjau dari ketinggian tempat, wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar berada pada ketinggian 0-499,9 m dpl yaitu 58,12%. Daerah yang berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. hanya sekitar 15,52%, sebagaimana dapat disimak pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Ketinggian Tempat

Sumber : BPS
Kabupaten Buleleng : Kab. Buleleng dalam Angka, 2020 (Diolah)

c. Geologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun oleh: (1) lapisan aluvial yang tersebar di bagian utara, (2) batuan gunung berapi tersebar di bagian selatan, dan (3) formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung tersebar di bagian barat. Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72 Ha (Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033). Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu

andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

d. Hidrologi

1). Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir difokuskan pada DAS prioritas I dan II. DAS prioritas I adalah DAS yang prioritas pengelolaannya paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosial ekonomi DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya sedang. Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng, yaitu Unda (prioritas 1), Blingkang Anyar (prioritas 1), Teluk Terima Pancoran (prioritas 2), Pangiayung (prioritas 2), Saba Daya (prioritas 2), Biluk Poh Gumbrih (prioritas 2), Klatakan Lubang (prioritas 2), Leh Balian (prioritas 2), dan Oten Sungi (prioritas 2).

2). Kualitas Air Sungai

Belum semua sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng terpantau kualitasnya. Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pemantauan rutin setiap tahun terhadap 3 (tiga) sungai utama, yaitu Sungai/Tukad Banyumala, Sungai/Tukad Saba, dan Sungai/Tukad Buleleng. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas air sungai pada bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Fosfat* sebagai P, Besi, Nitrit sebagai N, *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* melampaui baku mutu air minum Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016.

3). Air Danau/Waduk/Bendung/Embung

Terdapat2 buah danau, 2 buah waduk, 24 bendung, dan 1buah embung di Kabupaten Buleleng dengan total volume air sekitar 134.203.500 m^3. Volume air yang tertampung di danau Buyan sekitar 92.800.000 m^3. Sedangkan, di danau

Tamblingan sekitar 27.050.000 m^3. Danau Buyan dan danau Tamblingan merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dan merupakan penyangga tata guna air di daerah hilir dan sekitarnya. Dalam fungsinya sebagai penyedia air baku, fungsi Danau Buyan semakin menurun karena adanya sedimentasi yang belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Pada tahun 2015, volume sedimentasi mencapai 2.216,799 m^3. Akibat dari sedimentasi tersebut menyebabkan penurunan kedalaman air selama 3 tahun terakhir sebesar 20 m serta volume air menurun dari 116,25 juta m^3 menjadi 49,6 juta m^3 (BWS Bali Penida, 2016). Proses sedimentasi dan pendangkalan danau ini dipicu oleh pola pengelolaan lahan-lahan pertanian di pinggir danau yang kurang memperhatikan aspek-aspek konservasi tanah dan air. Beban erosi yang tinggi bercampur dengan pupuk dari lahan pertanian menyebabkan kondisi danau mengalami pengayaan nutrien yang memacu pertumbuhan tumbuhan air, khususnya eceng gondok dan kapung kili di danau.

Selain danau, juga terdapat waduk dan embung, yaitu waduk Gerokgak di Kecamatan Gerokgak, waduk Titab di Kecamatan Busungbiu, dan Embung Tembok di Desa Tembok Kecamatan Tejakula. Secara potensial, rata-rata volume air Waduk Gerokgak 3.750.000 m3 dan kondisinya berfluktuasi menurut musim. Secara teknis, waduk Titab memiliki luas genangan 68,83 Ha dengan volume tampungan efektif 10,60 juta m3 yang dimanfaatkan untuk irigasi dan juga akan dimanfaatkan untuk air minum dan pembangkit listrik. Pemanfaatan Waduk Titab sebagai irigasi mencakup daerah irigasi Saba dan Puluran seluas 1.915 Ha, daerah irigasi Lebah Semawa seluas 28 Ha, dan daerah irigasi Rawa seluas 23 Ha.

Pemanfaatan sebagai air minum sebesar 350 liter per detik akan dikelola sebagai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang mencakup wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Desa-desa yang akan dilayani oleh SPAM Burana (Buleleng Jembrana) adalah:

- Kecamatan Seririt (Unggahan, Munduk Bestala, Bestala, Mayong, Rangdu, Ularan, Ringdikit, Joanyar, Kalianget, Tangguwisia, Sulanyah, Bubunan, Seririt, Pengastulan, Patemon, Lokapaksa, Umeanyar, Banjarasem, Kalisada dan Pangkung Paruk).

- Kecamatan Banjar (Tampekan, Banjar Tegeha, Banjar, Dencarik, Temukus, dan Kaliasem).
- Kecamatan Busungbiu (Telaga, Titab, Kekeran, dan Busungbiu).
- Kecamatan Gerokgak (semua desa).

4). Mata Air

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga mempunyai fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Ke depan, kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m^3/tahun. Dari 243 sumber mata air yang ada di kabupaten Buleleng, sekitar 81 sumber mata air digunakan untuk penyediaan air minum, sisanya untuk irigasi dan lain-lain.

5). Klimatologi

Tipe iklim wilayah Kabupaten Buleleng berdasarkan klasifikasi *Schmidth*dan *Ferguson* bervariasi mulai dari tipe iklim C (nilai Q =50,68) di Wanagiri Kecamatan Sukasada dan sekitarnya, sampai tipe F (nilai Q = 170,73-244,33) di Pemuteran Kecamatan Gerokgak dan sekitarnya.Suhu udara rata-rata berkisar 26,9^{0}C-28,4^{0}C; kelembaban udara rata-rata mencapai 78%-84%, curah hujan antara 1.913,6-2.812,6 mm/tahun, dan penyinaran matahari mencapai 66-77%, sebagaimana dapat disimak pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kondisi Beberapa Unsur Iklim di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Unsur Iklim	Stasiun Pengamatan			
		Meteorologi Ngurah Rai	Geofisika Sanglah	Geofisika Karangasem	Klimatologi Negara
1.	Suhu (°C)				
	Maksimum	30,6	32,9	30,9	30,7
	Minimum	24,8	24,2	22,1	23
	Rata-rata	27,2	27,8	26,1	26,5
2.	Kelembaban Udara (%)				
	Maksimum	80	84	86	90
	Minimum	70	68	70	75
	Rata-rata	79	76	77	83
3.	Tekanan Udara (mb)	1.010,70	1.010,00	1.012,90	1.009,90
4.	Kecepatan Angin (knot)	6	5	5	2
5.	Curah Hujan (mm)	997,40	1.019,80	1.383,20	1.851,00
6.	Penyinaran Matahari(%)	87	60	80	77

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng : Kab. Buleleng dalam Angka, 2020

6. Wilayah Rawan Bencana

Dalam sejarahnya, wilayah Kabupaten Buleleng memiliki potensi bencana tanah longsor dan pernah pula terkena musibah gempa bumi. Secara alamiah, wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan potensi gempa tinggi karena dalam sejarahnya pernah terjadi beberapa kali gempa dahsyat yang menimbulkan kehancuran fisik dan banyak korban jiwa. Pulau Bali, termasuk Kabupaten Buleleng merupakan kawasan yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Samudra Pasifik dan India-Australia yang masing-masing bergerak ke barat dan ke utara relatif terhadap Eurasia.

Posisi ini menyebabkan Kabupaten Buleleng rawan gempa tektonik. Selain itu, di Bali terdapat beberapa gunung merapi aktif, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur yang berpotensi menyebabkan gempa vulkanik. Buleleng tergolong daerah rawan bencana tanah longsor karena topografi daerahnya yang berbukit, sebagian berlereng curam, disertai curah huan yang tinggi, dan kondisi tanah yang tergolong labil.

Selain rawan bencana tanah longsor dan gempa bumi, wilayah Kabupaten Buleleng juga rawan terjadi banjir bandang, kekeringan, badai ombak, angin puting beliung, dan kebakaran hutan. Data sebaran kerawanan bencana banjir dan kekeringan seperti tersaji pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Sebaran Kerawanan Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng

Kecamatan		Kerawanan (Ha)		Jumlah (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Buleleng	3.654	-	3.654
2	Sukasada	2.477	-	2.477
3	Seririt	2.957	-	2.957
4	Busungbiu	732	-	732
5	Tejakula	2.439	-	2.439
6	Banjar	1.980	-	1.980
7	Kubutambahan	2.721	-	2.721
8	Gerokgak	13.141	-	13.141
9	Sawan	3.341	-	3.341
Jumlah (Ha)		33.442		33.442

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Buleleng, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat secara keseluruhan bencana banjir memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng adalah 33.442 Ha yang berada pada kelas rendah. Kelas bahaya rendah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana.

Gambar 2.4

Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Buleleng

Selain bahaya banjir di musim hujan, di musim kemarau wilayah Buleleng juga memiliki potensi bencana kekeringan. Berdasarkan Tabel 2.11, terlihat secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng adalah 135.741 Ha yang berada pada kelas sedang. Kelas bahaya sedang Kabupaten Buleleng berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Hal ini dapat digambarkan melalui sebaran bahaya kekeringan menurut kecamatan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng

Kecamatan		Potensi (Ha)		Jumlah (ha)
		Rendah	Sedang	
1	Buleleng	-	4.653	4.65
2	Sukasada	-	16.809	16.80
3	Seririt	-	11.082	11.08
4	Busungbiu	-	19.650	19.65
5	Tejakula	-	9.769	9.76
6	Banjar	-	17.104	17.10
7	Kubutambahan	-	11.807	11.80
8	Gerokgak	-	35.634	35.63
9	Sawan	-	9.232	9.23
Jumlah (Ha)		-	135.741	135.74

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Buleleng, 2019

Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Buleleng

2.2. KEPENDUDUKAN

2.2.1. Perkembangan Penduduk

Informasi tentang jumlah penduduk sangat penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk disuatu wilayah dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (penambah penduduk), disisi lain dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Disamping itu jumlah penduduk dipengaruhi oleh Migrasi penduduk. Imigrasi (pendatang) akan menambah jumlah penduduk, Emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk.

Pada tahun 2019 Kabupaten Buleleng mempunyai jumlah penduduk 414.607 penduduk laki-laki dan 408.788 penduduk perempuan. Penduduk tersebut menyebar di 9 (Sembilan) wilayah Kecamatan. Jumlah dan retribusi penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan Kecamatan dapat di ketahui pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng

Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Gerokgak	50.074	49.449	99.523
2	Seririt	48.761	48.914	97.675
3	Busungbiu	27.782	27.659	55.441
4	Banjar	45.111	44.569	89.680
5	Sukasada	45.693	45.276	90.969
6	Buleleng	77.612	76.458	154.070
7	Sawan	42.905	42.246	85.151
8	Kubutambahan	36.716	35.775	72.491
9	Tejakula	39.953	38.442	78.395
	JUMLAH	414.607	408.788	823.395

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

2.2.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun diakibatkan oleh perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah baik karena perubahan alami maupun karena perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, indikator jumlah kepadatan penduduk berguna untuk mengetahui kerapatan jumlah penduduk dalam satu kesatuan ruang. Rasio kepadatan penduduk dihitung dengan rumus, Jumlah Penduduk : Luas Wilayah. Untuk dapat melihat kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2019	Luas Wilayah Km2	Kepadatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Gerokgak	99.523	356,57	279,11
2	Seririt	97.675	111,78	873,81
3	Busungbiu	55.441	196,62	281,97
4	Banjar	89.680	172,62	519,58
5	Sukasada	90.969	172,93	526,05
6	Buleleng	154.070	46,94	3.282,28
7	Sawan	85.151	92,52	920,35
8	Kubutambahan	72.491	118,24	613,08
9	Tejakula	78.395	97,68	802,57
JUMLAH		823.395	1.365,88	8.098,81

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

2.2.3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran prosentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu di bandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya angka pertumbuhan pendududk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah merupakan migrasi penduduk, Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecendrungan dan proyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Berikut tabel 2.8 penduduk Kabupaten Buleleng menurut umur dari tahun 2014 - 2019.

Tabel 2.8

Penduduk Kabupaten Buleleng menurut Umur Tahun 2015 – 2019

Kelompok Umur	Tahun					Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019	
0-4	29,450	48,842	47,696	62,327	52,559	
5-9	68,096	69,741	72,115	70,124	71,029	
10-14	69,519	68,487	70,802	70,570	70,058	
15-19	67,315	66,306	69,679	72,020	71,928	
20-24	64,060	64,928	63,944	65,396	66,044	
25-29	62,684	62,989	60,986	62,705	61,539	
30-34	71,420	69,564	64,582	62,821	59,813	
35-39	66,255	94,848	66,567	66,167	65,244	
40-44	62,447	60,047	60,042	60,090	60,661	
45-49	56,325	54,679	58,825	58,751	55,724	
50-54	46,849	45,642	45,958	46,776	51,124	
55-59	38,320	38,565	38,238	39,329	39,823	
60-64	31,632	28,905	30,696	32,187	32,495	
65-69	23,071	21,671	23,108	22,902	24,594	
70-74	20,117	17,927	16,601	16,250	16,730	
75 +	29,963	24,743	26,815	24,355	24,030	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

2.3. INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BULELENG 2019

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Buleleng

Indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dihasilkan oleh seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Dalam penghitungan PDRB Atas Dasar harga Konstan faktor harga pada tahun berjalan/bersangkutan telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan perkataan lain seluruh produksi maupun biaya antara pada tahun berjalan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010. Dengan memakai patokan tahun dasar ini bisa dilihat perkembangan produksi yang dihasilkan suatu daerah yaitu produksi barang dan jasa dari sektor-sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Buleleng.

Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebesar 35,51 Triliun rupiah, meningkat 2,57 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 32,94 Triliun rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada tahun 2019, Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,06 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

Gambar 2.6

Persentase Luas Wilayah dan PDRB Kabupaten Buleleng

Terhadap Provinsi Bali Tahun 2019

Sumber: BPS (diolah)

Secara riil, nilai PDRB Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 mencapai 23,44 Triliun rupiah. Meningkat sebesar 1,23 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 22,20 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB secara riil ini dapat diartikan bahwa ekonomi Kabupaten Buleleng tumbuh sebesar 5,55 persen pada tahun 2019. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami perlambatan tetapi mulai tumbuh lagi di tahun 2018 dan kembali melambat pada tahun 2019. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Buleleng sebesar 6,07 persen. Sementara di tahun-tahun berikutnya, Kabupaten Buleleng mencapai pertumbuhan ekonomi 6,02 persen di tahun 2016; 5,38 persen di tahun 2017; 5,62 persen di tahun 2018 dan melambat kembali di tahun 2019 yaitu mencapai 5,55 persen. Angka pertumbuhan di tahun 2019 ini masih di bawah laju pertumbuhan Bali yang mencapai 5,63 persen di tahun 2019, tetapi di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Gambar 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng, 2015 - 2019 (Persen)

Sumber: BPS (diolah)

Kategori yang paling berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng di tahun 2019 adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,21 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua adalah kategori perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 0,89 persen. Sementara kategori penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan ketiga di Kabupaten Buleleng dengan nilai 0,82 persen. Masih sama dengan tahun lalu, kategori konstruksi dan kategori informasi dan komunikasi menempati posisi keempat dan kelima sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dengan nilai masing-masing sebesar 0,68 persen dan 0,39 persen.

Gambar 2.8
Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng
Menurut Lapangan Usaha, 2018 (Persen)

Sumber: BPS (diolah)

https://bulelengkab.bps.go.id

2.3.2 Angka Kemiskinan

Berbicara mengenai kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan kondisi sosial di suatu wilayah tak bias dilepaskan dari pembahasan mengenai kemiskinan. Kemiskinan dirasa dapat dijadikan ukuran pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kemiskinan yang meningkat dapat memberikan sinyal bahwa iklim perekonomian perlu diperbaiki dan pembangunan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh Negara-negara lain, seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dalam menentukan penduduk yang miskin dan penduduk yang tidak miskin, BPS menggunakan Garis Kemiskinan sebagai *cut point,* dimana penduduk yang konsumsi rata-rata per kapitanya kurang dari Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan ini diperoleh dari penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Masing-masing kabupaten/kota di Indonesia memiliki Garis Kemiskinan yang berbeda. Demikian juga pada tingkat provinsi, masing-masing provinsi di Indonesia memiliki Garis Kemiskinan yang berbeda. Jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Bali, Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng selalu lebih tinggi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah 401.377 rupiah di Kabupaten Buleleng akan tergolong sebagai penduduk miskin.

Gambar 2.9
Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali
Tahun 2015 – 2019

Sumber: BPS (diolah)

https://bulelengkab.bps.go.id

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, penduduk digolongkan menjadi dua kelompok besar, yakni penduduk miskin dan penduduk tidak miskin menurut pengeluaran perkapita per bulannya. Penduduk miskin di Kabupaten Buleleng cenderung berfluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 34,26 ribu penduduk miskin.

Jumlah ini menurun sebesar 2,67 persen dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2018 yang mencapai 35,20 ribu penduduk. Selain itu, persentase penduduk Buleleng yang tergolong sebagai penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 5,36 persen pada tahun 2018 menjadi 5,19 pada tahun 2019.

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng,
Tahun 2015 – 2019 (000 Jiwa)

Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng,
Tahun 2015 – 2019

Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2019, upaya pengendalian kemiskinan di Kabupaten Buleleng tampaknya menunjukkan hasil yang positif. Meski sudah mengalami penurunan, kondisi ini masih perlu dipertahankan, sehingga segala upaya untuk mengurangi kemiskinan masih tetap perlu dijalankan bahkan akan lebih baik lagi jika dapat ditingkatkan. Hal ini mengingat bahwa Kabupaten Buleleng masih menempati posisi ketiga terbesar diantara 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam hal persentase penduduk miskin. Sebagaimana tampak pada gambar 2.12 bahwa kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi adalah Kabupaten Karangasem (6,25 persen), kemudian Kabupaten Klungkung menempati urutan kedua dengan penduduk miskin sejumlah 5,40 persen, sedangkan Kabupaten Buleleng menempati urutan ketiga.

Gambar 2.12

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota

se-Provinsi Bali Tahun 2019

Sumber: BPS (diolah)

https://bulelengkab.bps.go.id

Selain jumlah dan persentase, indikator lain terkait kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index)*, yang menunjukkan seberapa jauh jarak antara rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pada tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buleleng adalah sebesar

0,72 poin. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan Buleleng mencapai 0,62 poin. Adanya peningkatan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun dan menjahui garis kemiskinan. Berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Kabupaten Buleleng berada pada posisi dua tertinggi diantara sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dan berada di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan Bali yaitu sebesar 0,53. Padahal pada tahun 2018 berada di posisi tiga tertinggi dan di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Bali.

Gambar 2.13

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index)* menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2019

Sumber: BPS (diolah)

Selain mengukur kedalaman kemiskinan, BPS juga mengukur disparitas atau jarak kesenjangan pendapatan yang terjadi antar penduduk miskin. Kesenjangan tersebut diukur dengan indicator yang disebut dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index).* Pada tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Buleleng naik dari 0,13 poin pada tahun 2018

menjadi 0,14 poin pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin sedikit melebar di tahun 2019.

Gambar 2.14

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index)* menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2019

Sumber: BPS (diolah)

2.4. KETENAGAKERJAAN

Tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah :

- Terwujudnya tenaga terampil dan professional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Terwujudnya perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
- Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja.
- Pemerataan penyebaran tenaga kerja / penduduk.

Sedangkan sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.
- Menurunnya jumlah pengangguran.
- Menurunnya jumlah perselisihan hubungan industrial / pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Meningkatnya masyarakat untuk bertransmigrasi.

2.4.1. Kondisi Umum Ketenagakerjaan Di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2015 - 2019

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng berubah dari tahun ke tahun akan memicu adanya masalah sosial. Jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan kesempatan kerja mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi.

Tabel 2.9
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penduduk	746.720	811.923	811.923	819.660	823.395
2	Jumlah Tenaga Kerja	345.326	-	477.520	492.177	497.484
3	Angkatan Kerja	352.510	-	486.403	378.313	346.597
4	Bekerja	345.326	-	477.520	371.368	336.119
5	Pengangguran	7.184	-	8.883	7.445	10.480
6	Bukan Angkatan Kerja	124.210	-	119.463	278.887	150.887
7	Setengah Pengangguran	98.888	-	109.024	97.620	112.040
8	Tingkat Pengangguran	2,04%	-	2,41%	1,84%	3,02%

SumberData :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
* : Tidak diadakan Sakernas

2.4.2. Jumlah Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

Masalah pengangguran adalah masalah nasional tingginya angka pengangguran di Kabupaten Buleleng memerlukan penanganan bersama mulai dari sector hulu sampai hilir karena salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah adanya angka pengangguran yang tinggi, untuk itulah diperlukan program yang sinergis dan berkerlanjutan dari semua sektor serta melibatkan steakholder yang ada.

Tabel 2.10
Data Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	ANGKATAN KERJA	PENGANG GURAN	PROSEN TASE (%)	KETERANGAN / PENJELASAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (4/3 x 100%)*
1	2015	352.510	7.184	2,10	7.184 / 352.510 x 100 = 2,10
2	2016*	-	-	-	-
3	2017	366.940	8.833	2,40	8.833 / 366.940 x 100 = 2,40
4	2018	378.313	7.445	1,97	7.445 / 378.313 x 100 = 1,97
5	2019	346.597	10.480	3,02	10.480 / 346.597 x 100 = 3,02

SumberData :Dinas Tenaga KerjaKabupatenBuleleng
* : Tidak diadakan Sakernas

2.4.3. Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Terserap Dalam Dunia Kerja Tahun 2015 - 2019

Data penyandang disabilitas yang terserap dalam dunia kerja tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Buleleng, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.11
Data Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Terserap Dalam Dunia Kerja

TAHUN														
2015			**2016**			**2017**			**2018**			**2019**		
L	**P**	**JML**	**L**	**P**	**JML**	**L**	**P**	**JML**	**L**	**P**	**JML**	**L**	**P**	**JML**
1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng

2.4.4. Jumlah Pekerja Migran Yang Kembali Ke Kab. Buleleng Tahun 2019

Data jumlah pekerja migran yang kembali ke Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.12

Data Jumlah Pekerja Migran Yang Kembali Ke Kab. Buleleng Tahun 2019

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019			KET
		L	P	JML	
1	GEROKGAK	130	27	157	
2	SERIRIT	214	26	240	
3	BUSUNGBIU	120	30	150	
4	BANJAR	135	24	159	
5	BULELENG	155	31	186	
6	SUKASADA	-	-	-	
7	SAWAN	187	32	219	
8	KUBUTAMBAHAN	44	5	49	
9	TEJAKULA	221	28	249	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng

2.4.5. Data Jumlah Perusahaan (Dunia Usaha) Di Kab. Buleleng Th. 2015 - 2019

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Buleleng di tahun 2019 semakin menggeliat sehingga banyak perusahaan yang belum mendaftarkan usahanya. Keberadaan Dunia Usaha diharapkan dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, hal ini juga akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian yang semakin baik yang pada nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Disamping itu juga Dunia Usaha dapat menjadi mitra kerja Pemerintah dalam upaya memberikan partisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Coorporate Social Responcibility (CSR). Berikut kami sajikan jumlah perusahaan yang terdaftar dari tahun 2015- 2019 seperti Tabel berikut:

Tabel 2.13
Data Jumlah Dunia Usaha di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH YANG TERDAFTAR	PROSENTASE (%)	KETERANGAN / PENJELASAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (4/3 x 100%)*
1	2015	503	503	100	503 / 503 x 100 = 100%
2	2016	295	99	34	295 / 99 x 100 = 34%
3	2017	708	-	-	-
4	2018	892	-	-	-
5	2019	1.505	325	21,59	325 / 1.505 x 100 = 21,59%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng

BAB III

SUMBER DAYA

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

3.1.1 Visi dan Misi

Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam pencapaian kinerja perencanaan maupun pelaksanaan tugas - tugas yang menjadi kewenangan SKPD. Pada hakekatnya perumusan dan penetapan visi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus disusun bersama, diwujudkan bersama sehingga visi yang dihasilkan menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselator kinerja bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun Visi serta didasarkan pada kondisi, analisis isu lingkungan dan karakterestik spesifik yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng, maka ditetapkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 adalah ***"Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana".***

a. Penjabaran makna dari Visi :

1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

4. **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

b. Berkaitan dengan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan kedalam 6 **Misi** sebagai berikut :

1. ***Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;***
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikator yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 sesuai misi I (satu) yang telah ditetapkan di atas adalah seperti berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022

Misi 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2017)	TARGET					KONDISI AKHIR (2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Persentase menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1. Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	3,40%	4,00%	4,60%	5,20%	5,80%	5,80%
			2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28 %	12,80 %	15,40 %	18,00 %	19,30 %	20,50 %	20,50%

Sedangkan Arah Kebijakan dalam RPJMD yaitu :

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial; dengan indikator sasarannya : % PMKS yang tertangani.
2. Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adatterpencil dan PMKS, dengan indikator sasarannya : % PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

Dari penyelenggaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dan dikaitkan dengan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dirumuskan dalam rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dan misi Kepala Daerah tujuan dan sasaran yang harus dicapai yaitu :

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu : ***" Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif "*** melalui tujuan yaitu :

"Meningkatnya efektifitas pelayanan terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Nilai Kepahlawanan" , guna tercapainya tujuan tersebut dilaksanakan melalui :

1. *Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial* ***dengan tujuan*** menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan peningkatan keberfungsian sosial, kemandirian serta keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. *Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial* ***dengan tujuan*** Meningkatkan pembinaan, pengetahuan dan partisipasi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanganan PMKS dan mengembangkan kemampuan LKS dan dunia usaha dalam menyelenggarakan pelayanan kesos yang profesional;
3. *Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial* ***dengan tujuan*** Menumbuhkan semangat nasionalisme serta kesetiakawanan sosial bagi masyarakat dan generasi muda dan menjamin kesejahteraan keluarga pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah : ***" Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin"*** melalui :

a. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.

c. Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Meningkatnya efektifitas pelayanan terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Nilai Kepahlawanan	1. Meningkat-nya kualitas hidup, kemandi-rian, keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyan-dang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	• Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.	3,40% (2.261 orang)	4,00% (2.569 orang)	4,60% (2.837 orang)	5,20% (2.941 orang)	5,80% (3.018 orang)
		2. Meningkat-nya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial	10%	15%	20%	25%	30%
		3. Meningkat-nya nilai kepahlawanan dan kesetiaka-wanan sosial	Peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	18%	18%	18%	18%	18%

3.1.3 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan koordinasi internal dan eksternal kelembagaan dalam penanganan masalah sosial;
b. Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penanggulangan bencana dan pasca bencana maupun masalah sosial lainnya;
c. Menetapkan jalur dan ruang evakuasi bagi penduduk rawan terkena bencana;
d. Pengkajian dan Pemetaan kerawanan sosial dalam rangka mitigasi bencana sosial atau bencana alam;
e. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha dalam penanganan masalah sosial;
f. Meningkakan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah sosial/masyarakat miskin;
g. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial; dan
h. Meningkatkan peran dan partisipasi kelembagaan dan masyarakat dalam penggalian, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

3.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan asset pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang urusan sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B, dimana sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara lebih lanjut juga diuraikan pada Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memiliki *tugas pokok* membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.

Adapun susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
   a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
   b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
   a) Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
   b) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
   c) Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
4. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
   a) Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
   b) Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga
   c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   a) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan kelembagaan Masyarakat
   b) Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
   c) Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensip bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (asset) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam uraian tugas dan fungsi

meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan asset yang dikelola dengan penjelasan sebagai berikut :

3.2.1 Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 131 orang terdiri dari 25 orang PNS di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan 2 orang PNS di UPTD Monumen Tri Yudha Sakti serta tenaga kontrak keseluruhan sebanyak 104 orang, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Sampai Dengan Tahun 2020

Tabel 3.3
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
6	Pengatur (II/c)	1	2	3
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	2	3
8	Penata Muda (III/a)	1	-	1
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	2	3
10	Penata (III/c)	1	1	2
11	Penata Tk. I (III/d)	6	4	10
12	Pembina (IV/a)	1	2	3
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	0
Jumlah		14	13	27

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

1.2. Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Sampai Dengan Tahun 2020

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebanyak 131 orang tentunya tidak memadai bila dibandingkan dengan beban kerja dan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja sebagai status kontrak kerja yang bertugas di bagian administrasi, Operator IT, Sopir, Tenaga Penjaga Perahu, Tenaga Cleaning Service dan tukang kebun, penjaga malam yang bertugas di Kantor Dinas, Monumen dan Tugu Perjuangan yang menjadi tugas pemeliharaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Adapun jumlah Tenaga Kontrak Kerja yang dipekerjakan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Daftar Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kontrak Administrasi	26	24	50
2	Tenaga Kontrak Sopir	5	-	5
3	Tenaga Kontrak Tukang Kebun / Cleaning Service	38	10	48
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	1	-	1
Jumlah		70	34	104

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng secara rinci dapat kami sampaikan seperti dalam Tabel berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin :

Tabel 3.5
Data PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	-	-	0
2	Sekretariat	4	7	11
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	2	2	4
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2	2	4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	5	1	6
Jumlah		13	12	25

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

b. Menurut Jenjang Pendidikan (PNS)

Tabel 3.6
Data PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas							0
2	Sekretariat	1	1	1	8			11
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	2		1			4
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		3		1			4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		3		3			6
Jumlah		2	9	1	13			25

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

c. Menurut Jenis kelamin (Tenaga kontrak)

Tabel 3.7

Data Pegawai Kontrak pada Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	14	13	27
2	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	10	5	15
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6	6	12
4	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	10	3	13
Jumlah		40	27	67

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

d. Menurut Jenjang Pendidikan (Tenaga Kontrak)

Tabel 3.8

Data Pegawai Kontrak Dinas Sosial Kab. Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat		6	4	13	3	1	27
2	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		5		10			15
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		5		7			12
4	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		4	2	7			13
Jumlah			20	5	38	3	1	67

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

e. Menurut Golongan Ruang :

Tabel 3.9
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Golongan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas																	0
2	Sekretariat						1	3	2	1	1	1	1		1			11
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin											1	3					4
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial												3	1				4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial								1		1		2	2				6
Jumlah							1	3	3	1	2	2	9	3	1			25

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

3.2.2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Jumlah PNS yang ada pada UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan saat ini sebanyak 2 orang, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.10
Data PNS pada UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala UPTD	1		1
2	Tata Usaha		1	1
Jumlah		1	1	2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 3.11
Data Pegawai UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala UPTD		1					1
2	Tata Usaha		1					1
Jumlah			2					2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

c. Menurut Golongan Ruang

Tabel 3.12

Data Pegawai UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan Menurut Jenjang Golongan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	C	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala UPTD												1					1
2	Tata Usaha										1							1
Jumlah											1		1					2

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

3.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan urusan bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Mobil	6	Unit
2	Sepeda motor :	29	Unit
3	Komputer :		
	1. PC	21	Unit
	2. Laptop	30	Unit
	3. Projector	3	Unit
	4. Printer	42	Unit
4	Meubeler :		
	1. Meja	123	Buah
	2. Kursi	245	Buah
	3. Brankas	3	Buah
	4. Lemari	3	Buah
	5. Meja Pingpong	1	Unit
5	Mesin Ketik	1	Unit
6	Filling cabinet	9	Unit
7	Elektronik :		
	1. Televisi	3	Unit
	2. Handycam	2	unit
	3. Kamera	10	unit
	4. AC	21	unit
	5. Faximili	2	unit
	6. Kulkas	2	unit
	7. Parabola	1	unit
	8. Reciver	1	unit
	9. Tape	1	unit
8	Rak :		
	1. Rak Kayu	11	Buah
	2. Rak TV	1	Buah
9	Korden	5	Set
10	Jam Dinding	4	Buah
11	Papan White Board	7	Buah
12	Tabung Gas	1	Unit
13	Kompor Gas	1	Unit

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2020

3.3 TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

I. TUGAS :

Dinas Sosial, Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial.

II. FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Di Bidang Sosial;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Sosial;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati.

III. URAIAN TUGAS :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Sosial, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Sosial;
e. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Sosial dan Lanjut Usia;
g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disstabilitas;

h. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial;
i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial;
j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
k. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
l. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengolahan data dan informasi kesejahteraan soaial;
m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
n. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
o. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
p. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Sosial;
q. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Sosial serta UPT;
r. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
s. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Sosial;
t. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Sosial;
u. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Sosial;

v. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Sosial;
w. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Sosial;
x. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
a. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
b. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
c. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial;
d. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Sosial;
h. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
i. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Sosial;

j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial;
k. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
l. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial;
m. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Dinas Sosial;
n. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas dan UPT yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
e. menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas;
f. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
h. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial;

i. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
j. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Sosial;
e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Dinas Sosial;
f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian dilingkungan Dinas Sosial serta UPT;
g. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi : penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezeting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
h. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
i. menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Sosial;

j. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) dilingkungan Dinas Sosial;
k. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial;
l. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
m. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi: penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
n. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
o. melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. memfasilitasi, dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan,

pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkotika (korban penyalahgunaan Napza), pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno deficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar, anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus dan Lanjut usia terlantar ;

f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendataan, inventarisasi, pemberian bimbingan sosial dan bimbingan teknis, melatih, pemberian bantuan sosial, pemberian santunan hidup, rehabilitasi serta supervisi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental,fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, ekspenderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik,eks pecandu narkotika (Napza), pengguna psikotropika sindromaketergantungan, orang dengan Human Immuno DeficiencyVirus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korbantindak kekerasan, korban perdaganganorang, orang gila terlantar, anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus dan lanjut usia terlantar dan tidak produktif ;
g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tugasnya kepada atasan ; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.1. SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA.

Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia, berdasarkan data dan program Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

e. melaksanakan pendataan, menginventarisasi, seleksi, memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan bantuan sosial serta bimbingan kesejahteraan sosial terhadap anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia;
f. membantu memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pengangkatan anak ke Dinas Sosial Provinsi Bali;
g. mendata, dan menginventarisasi pemberian bantuan santunan hidup bagi anak terlantar dan lanjut usia yang tidak produktif luar panti;
h. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.2. SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS.

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, berdasarkan data dan program pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. menyiapkan data dan menginventarisasi bahan dalam rangka pembinaan, penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitasfisik, mental, fisik dan mental/bukan gila, tuna rungu, tuna wicara dan tuna rungu wicara;
e. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan penanganan eks penderita penyakit kronis (TBC, paru-paru dan penyakit kronis lainnya);
f. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pendampingan dan melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti;
g. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian bantuan santunan hidup/asistensi soaial bagi penyandang disabilitas berat luar panti;

h. mendata, menginventarisasi, memfasilitasi dan merekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat pemberi bantuan penyandang disabilitas dan penyakit kronis;
i. mendata, menginventarisasi lembaga pendidikan/pelatihan para penyandang disabilitas;
j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.3. SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL.

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, berdasarkan data dan program pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. mendata, menginventarisasi, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan rehabilitasi sosial dan mental penyandang tuna sosial (tuna susila, germo/mucikari, waria, LGBT, kelompok minoritas), eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, tokoh masyarakat, karang taruna di lingkungan rawan tuna sosial;
e. melaksanakan penanganan rehabilitasi dan koordinasi dengan Instansi terkait terhadap orang gila terlantar;
f. mendata dan menginventarisasi membina, membimbing serta pemulangan gelandangan dan pengemis;
g. mendata, menginventarisasi, menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial tuna susila, orang dengan HIV/ AIDS, korban Napza;
h. mendata, menginventarisasi, menyelenggarakan dan melaksanakan razia gelandangan, pengemis dan tuna susila;
i. mendata dan menginvetarisasi pembinaan bimbingan sosial, motivasi dan rehabilitasi serta pelatihan keterampilan bagi eks narapidana;

j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL.

Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan, bantuan dan pengendalian perlindungan sosial terhadap korban bencana baik alam maupun sosial;
e. memfasilitasi dan melaksanakan penyedian kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban pasca bencana;
f. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
g. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi perlindungan sosial bagi keluarga dalam keadaan darurat;
h. memfasilitasi dan melaksanakanpendataan, menginventarisasi, menyusun pedoman/petunjuk teknis dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial;
i. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, pengembangan sumber daya manusia dan pendamping bidang perlindungan dan jaminan sosial;
j. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan mengembalikan orang terlantar ketempat asal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
k. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, mengevaluasi dan melaksanakan penguburan mayat terlantar;

l. memfaslitasi pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana);
m. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga sangat miskin, pekerja sektor informal dan pekerja mandiri, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai peraturan perundang-undangan;
n. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan/pemutahiran data, pengolahan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) berskala Kabupaten;
o. memfasilitasi dan melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan validasi data fakir miskin, data penerima program perlindungan dan jaminan sosial serta informasi kesejahteraan sosial berskala Kabupaten;
p. memfasilitasi dan melaksanakan Penyuluhan Sosial dibidang usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan informasi pengembangan kesejahteraan sosial;
q. memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
r. memfasilitasi penyiapan bahan, data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.1. SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL PASCA BENCANA.

Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana, berdasarkan data dan program pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan, bantuan dan pengendalian perlindungan sosial terhadap korban bencana baik alam maupun sosial;
e. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban pasca bencana;
f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
g. mendata dan menginventarisasi perlindungan sosial bagi keluarga dalam keadaan darurat;
h. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan menyusun pedoman/petunjuk teknis dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial;
i. mendata, menginventarisasi dan pengembangan sumber daya manusia bidang perlindungan sosial;
j. mendata, menginventarisasi dan mengembalikan orang terlantar ketempat asal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
k. mendata, menginventarisasi, mengevaluasi dan melaksanakan penguburan mayat terlantar;
l. melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana);
m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.2. SEKSI JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA.

Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga, mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga, berdasarkan data dan program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. mendata, menginventarisasi, menyusun pedoman/ petunjuk teknis dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jaminan kesejahteraan sosial keluarga melalui program keluarga harapan;
e. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga sangat miskin, pekerja sektor informal dan pekerja mandiri, sesuai peraturan perundang-undangan;
f. mendata, menginventarisasi, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia serta pendamping bidang jaminan kesejahteraan sosial;
g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.3. SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan sosial, mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, berdasarkan data dan program Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. menyiapkan blanko pendataan terhadap data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
e. melaksanakan pendataan/pemutahiran data, pengolahan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) berskala Kabupaten;
f. melaksanakan pengelolaan verifikasi dan validasi data fakir miskin, data penerima program perlindungan dan jaminan sosial serta informasi kesejahteraan sosial berskala Kabupaten;

g. melaksanakan Penyuluhan Sosial dibidang usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan informasi pengembangan kesejahteraan sosial;
h. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
i. menyiapkan bahan dan data dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menginformasikan hasil pelaksanaan kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi peyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis motivasi, bimbingan sosial, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan organisasi sosial;
g. memfasilitasi dan memeberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;

h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan izin bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan sosial/penyelenggara undian gratis berhadiah berskala Kabupaten;
i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penertiban dan pengawasan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang;
j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada di lingkungan perkotaan, pedesaan dan pesisir yang kurang layak huni/kumuh;
k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin, keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuanrawan sosial ekonomi;
l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.1. SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
e. melaksanakan pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial dan bantuan sosial serta pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS) dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya;
f. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, pilar-pilar partisipasi masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
g. mendata, menginventarisasi melaksanakann bimbingan, pengembangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pendirian, perizinan, pendaftaran yayasandan operasional terhadap panti sosial, lembaga kesejahteraan sosial, tempat penitipan anak dan kelompok bermain;
h. mendata, menginventarisasi dan memverifikasi pemberian bantuan sosial dan rujukan donator /penyumbang terhadap yayasan sosial dan panti sosial;
i. mendata, memverifikasi, mengkoordinasi, memproses dan menerbitkan rokomendasi dan/atau izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah berskala Kabupaten;
j. mendata, menginventarisasi, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pengelolaan sumber dana bantuan sosial, pengumpulan uang dan barang melalui sumbangan dana masyarakat, corporate sosial responcibility dan undian berhadiah;
k. mendata, menginventarisasi, melaksanakan pengendalian dan pengawasan dana sosial dan undian berhadiah;
l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.2. SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN.

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas dan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. menyusun rencana pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan;
e. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan tugas;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan usaha-usaha kesejahteraan sosial fakir miskin;
g. mendata, menginventarisasi, dan membina pemberdayaan usaha kesejahtraan sosial (UKS) berbasis masyarakat desa;
h. mendata, menginventarisasi, membina dan motivasi pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi melalui pemerdayaan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP);
i. mendata, menginventarisasi, membina, memberdayakan dan melaksanakan pemberian bantuan stimulant melalui kelompok usaha bersama (KUBE) serta perumahan layak huni kepada keluarga fakir miskin;
j. melaksanakan pemberian bantuan sosial dan santunan kematian bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin;
k. memberikan bimbingan sosial, pemberdayaan sosial dan pendampingan guna meningkatkan pelayanan sosial fakir miskin;
l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.3. SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, mempunyai tugas dan fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, berdasarkan data dan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
d. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
e. mendata, menginventarisasi para veteran dan keluarga veteran;
f. mendata, menginventarisasi perlengkapan/sarana kerja dan melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Museum Perjuangan dan Monumen/ Tugu Perjuangan lainnya;
g. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pembinaan kepahlawanan bagi generasi muda;
h. mendata menginventarisasi dan melaksanakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan printis kemerdekaan;
i. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian bantuan/ penghargaan bagi veteran / keluarga veteran;
j. melaksanakan memonitor usaha pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan;
k. melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan monumen dan tugu pahlawan;
l. melaksanakan peringatan hari Pahlawan, Napak Tilas Perjuangan Pahlawan I Gusti Ngurah Rai, HUT Monumen Bhuana Kerta dan Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Nasional (BBKS);
m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

DATA UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL

4.1 URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten.

Beberapa jenis pelayanan dasar bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar,pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial tuna susila khususnya gelandangan pengemis dan perlindungan jaminan sosial tanggap darurat korban bencana di Kabupaten Buleleng,sehingga jenis - jenis pelayanan dasar tersebut merupakan langkah strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Buleleng.

4.2 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Jenis PMKS	Satuan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak	164	141	305
2	Anak Terlantar (AT)	Anak	780	583	1.363
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Anak	19	1	20
4	Anak Jalanan	Anak	9	0	9
5	Anak Dengan Kedissabilitas (ADK)	Anak	400	262	662
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	Anak	17	33	50
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	2	2	4
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1.992	3.622	5.614
9	Penyandang Disabilitas	Orang	2.361	1.739	4.100
10	Tuna Susila	Orang	0	3	3
11	Gelandangan	Orang	3	2	5
12	Pengemis	Orang	0	0	0
13	Pemulung	Orang	89	39	128
14	Kelompok Minoritas	Orang	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	174	13	187
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	531	450	981
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	55	3	58
18	Korban Trafficking	Orang	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	2	2	4
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	0	34	34
21	Korban Bencana Alam	KK	0	0	1.837
22	Korban Bencana Sosial	Orang	0	1	1
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	0	4.052	4.052
24	Fakir Miskin (FM)	KK	0	0	28.453
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	36	8	44
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	0	0	0

Sumber Data :

- Point 3 dan 6 bersumber dari Sakti Peksos Kabupaten Buleleng
- Point 15 bersumber dari LP Kelas II B Singaraja
- Point 16 merupakan data dampingan Kosala
- Point 17 bersumber dari BNN

4.3 JENIS - JENIS PELAYANAN DASAR DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Jenis - jenis pelayanan dasar yang merupakan langkah strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

4.3.1 Anak Terlantar

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah sebagai berikut :

a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
b. Anak yang dilalaikan oleh orangtuanya; dan
c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 4.2.
Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Gerokgak	210	112	322	30	31	61	111	191	302	93	208	301	164	109	273
2	Seririt	129	114	243	20	23	43	94	180	274	94	179	273	99	65	164
3	Busungbiu	38	25	63	-	-	-	15	23	38	15	22	37	31	23	54
4	Banjar	96	90	186	5	6	11	83	118	201	70	130	200	94	87	181
5	Sukasada	153	85	238	-	18	18	114	120	234	92	141	233	97	85	182
6	Buleleng	147	122	269	4	11	15	143	118	261	104	156	260	100	103	203
7	Sawan	76	67	143	-	-	-	80	48	128	71	56	127	76	49	125
8	Kubutam bahan	63	47	110	-	-	-	89	33	122	74	47	121	79	40	119
9	Tejakula	41	29	70	-	-	-	40	30	70	35	34	69	40	22	62
Jumlah		**953**	**691**	**1.644**	**59**	**89**	**148**	**769**	**861**	**1630**	**648**	**973**	**1.621**	**780**	**583**	**1.363**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.2 Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan;

b. Terlantar secara psikis, dan sosial.

Tabel 4.3.
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Gerokgak	455	613	1.068	104	200	304	451	496	947	292	653	945	526	768	1294
2	Seririt	242	577	819	150	123	273	315	427	742	185	561	746	205	377	582
3	Busungbiu	74	162	236	74	162	236	211	304	515	101	421	522	98	355	453
4	Banjar	135	218	353	135	218	353	321	275	596	194	428	622	177	385	562
5	Sukasada	262	530	792	262	530	792	561	262	823	388	374	762	164	373	537
6	Buleleng	286	639	925	286	639	925	467	386	853	356	500	856	345	544	889
7	Sawan	145	377	522	145	377	522	189	282	471	179	322	501	182	358	540
8	Kubutambahan	88	267	355	88	267	355	58	281	339	92	366	458	152	278	430
9	Tejakula	63	162	225	63	162	225	172	53	225	126	449	575	143	184	327
Jumlah		**1.750**	**3.545**	**5.295**	**1.307**	**2.678**	**3.985**	**2.745**	**2.766**	**5.511**	**1.913**	**4.074**	**5.987**	**1.992**	**3.622**	**5.614**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.3 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
d. Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
e. Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

Tabel 4.4.
Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Gerokgak	391	373	764	477	306	783	477	306	783	461	308	769	500	319	819
2	Seririt	382	241	623	377	257	634	377	257	634	362	258	620	245	162	407
3	Busungbiu	167	93	260	164	93	257	164	93	257	151	92	243	149	137	286
4	Banjar	270	177	447	268	185	453	268	185	453	348	191	439	339	305	644
5	Sukasada	398	282	680	395	270	665	395	270	665	379	272	651	300	190	490
6	Buleleng	297	295	592	295	222	517	295	222	517	283	220	503	230	170	400
7	Sawan	270	199	469	258	183	441	285	183	441	264	163	427	108	71	179
8	Kubutam bahan	322	218	540	316	194	510	316	194	510	296	200	496	311	235	546
9	Tejakula	250	151	401	232	164	396	232	396	396	212	170	382	179	150	329
Jumlah		2.747	2.029	4.776	2.782	1.874	4.656	2.783	1.874	4.657	2.656	1.874	4.530	2.361	1.739	4.100

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.4 Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

Tabel 4.5.

Jumlah Tuna Susila di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Gerokgak	-	6	6	-	5	5	-	4	4	-	4	4	-	-	-
2	Seririt	-	4	4	-	6	6	-	5	5	-	5	5	-	-	-
3	Busungbiu	-	2	2	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-
4	Banjar	-	2	2	-	3	3	-	2	2	-	2	2	-	1	1
5	Sukasada	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-
6	Buleleng	-	7	7	-	8	8	-	6	6	-	6	6	-	-	-
7	Sawan	-	2	2	-	3	3	-	3	3	3	3	6	-	-	-
8	Kubutambahan	-	4	4	-	5	5	-	4	4	-	4	4	-	2	2
9	Tejakula	-	1	1	-	1	1	-	0	0	-	1	1	-	-	-
Jumlah		**-**	**29**	**29**	**-**	**35**	**35**	**-**	**26**	**26**	**3**	**27**	**30**	**-**	**3**	**3**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.5 Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Tabel 4.6.

Jumlah Gelandangan di Kabupaten BulelengTahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Gerokgak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
2	Seririt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Busungbiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sukasada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Buleleng	3	2	5	-	-	-	3	5	8	3	8	11	-	-	-
7	Sawan	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	5	5	1	-	1
8	Kubutambahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	Tejakula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	2	5	-	-	-	7	6	13	3	13	16	3	2	5

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.6 Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
b. Berpakaian kumuh dan compang camping;
c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Tabel 4.7.
Jumlah Pengemis di Kabupaten BulelengTahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Gerokgak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Seririt	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	Busungbiu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Banjar	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
5	Sukasada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Buleleng	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-
7	Sawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kubutambahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tejakula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**1**	**-**	**1**	**-**	**3**	**3**	**-**	**3**	**3**	**-**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.7 Korban Bencana Alam

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya. Kriterianya adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami :

a. Korban terluka atau meninggal;
b. Kerugian harta benda;
c. Dampak psikologis; dan
d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Tabel 4.8.

Jumlah Korban Bencana Alam di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Gerokgak	1	268	18	89	344
2.	Seririt	528	125	539	287	551
3.	Busungbiu	2	1	9	1	6
4.	Banjar	23	1	77	526	288
5.	Sukasada	15	228	331	92	61
6.	Buleleng	477	1	398	1.822	386
7.	Sawan	51	13	86	94	54
8.	Kubutambahan	74	-	453	347	388
9.	Tejakula	1	-	199	-	193
Jumlah		1.172	637	2.110	3.258	2.271

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.3.8 Fakir Miskin

Penyandang Masalah Sosial Lainnya yaitu Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
b. Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tabel 4.9.
Jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML (KK)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	Gerokgak	3.469	322	3.791	3.469	322	3.791	2.864	3.434	6298	-	-	5.416	-	-	5.123
2	Seririt	1.712	113	1.825	1.712	113	1.825	1.875	2.293	4168	-	-	3.291	-	-	3.165
3	Busungbiu	1.167	47	1.214	1.167	47	1.214	4.671	1.276	3395	-	-	2.518	-	-	1.120
4	Banjar	1.208	53	1.261	1.208	53	1.261	3.486	2.290	5776	-	-	4.899	-	-	5.312
5	Sukasada	1.928	88	2.016	1.928	88	2.016	2.301	837	3138	-	-	2.261	-	-	1.751
6	Buleleng	2.987	291	3.278	2.987	291	3.278	948	2.282	3230	-	-	2.353	-	-	604
7	Sawan	847	196	1.043	847	196	1.043	1.307	3.980	5287	-	-	4.410	-	-	70
8	Kubutambahan	1.301	60	1.361	1.301	60	1.361	2.235	807	3042	-	-	2.165	-	-	1.924
9	Tejakula	280	23	303	280	23	303	2.700	978	3678	-	-	2.801	-	-	177
Jumlah		**14.899**	**1.193**	**16.092**	**14.899**	**1.193**	**16.092**	**22.387**	**15.625**	**38.012**	**-**	**-**	**30.114**		**-**	**19.246**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.4 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penanganan PMKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 4.10.
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kab. Buleleng Tahun 2019

No	Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Satuan	Jenis Kelamin		
			L	P	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	1	0	1
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	179	43	222
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	80	4	84
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	36	-	36
5	Karang Taruna (KT)	KT	-	-	148
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Lembaga	-	1	1
7	Keluarga Pionir	KK	15	-	15
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSKBM)	Lembaga	3	-	3
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	-	84	84
10	Penyuluh Sosial	Orang	7	4	11
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	9	1	10
12	Dunia Usaha	Pengusaha	16	19	36

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

4.4.1 Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

4.4.2 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. Bersedia mengabdi untuk kepentingan umum;
e. Berkelakuan baik;
f. Sehat jasmani dan rohani;
g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

4.4.3 Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana:

a. Generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;

c. Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
e. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.4.4 Lembaga Kesejahteraan Sosial Selanjutnya Disebut LKS

Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4.4.5 Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
d. Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

4.4.6 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Organisasi Sosial;
b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
c. Didirikan secara formal; dan
d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

4.4.7 Keluarga Pioner

Keluarga Pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
b. Keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;
c. Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan
d. Keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.

4.4.8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/ RW/ Kampung/ Desa/ kelurahan/ nagari/ banjar atau wilayah adat;
b. Jaringan sosial yang berada di RT/ RW/ Kampung/ Desa/ Kelurahan/ nagari/ banjir atau wilayah adat; dan
c. Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.

4.4.9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
b. Berpendidikan minimal SLTP;
c. Wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
d. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
e. Memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

4.4.10 Penyuluh Sosial

Penyuluh Sosial ada Penyuluh Sosial Fungsional dan Penyuluh Sosial Masyarakat. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a) Berijazah sarjana (S1)/Diploma IV;
b) Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;

c) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
d) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
e) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
f) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a) Memilki pendidikan minimal SLTP/sederajat;
b) Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
c) Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
d) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
e) Taruna Siaga Bencana (Tagana);
f) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamantan (TKSK);
g) Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
h) Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
i) Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
j) Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
k) Memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
l) Paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
m) Memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

4.4.11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Yang Selanjutnya Disebut TKSK

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Berasal dari unsur masyarakat;
b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

4.4.12 Dunia Usaha

Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial. Kriterianya adalah sebagai berikut:

a. Peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
b. Membantu penanganan masalah sosial.

BAB V
PROFIL KESEJAHTERAAN SOSIAL

5.1 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Sosial, mempunyai Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir miskin, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial

5.1.1 Program Dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan fakir miskin, dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
   b. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dalam bentuk bansos
   c. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo dalam melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan melakukan Kegiatan sebagai berikut:
   a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
   b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
   c. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial dengan melakukan Kegiatan sebagai berikut:
   a. Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan social
   b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan

5.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

Program dan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin direalisasikan dalam bentuk Bansos (uang/barang) dan Rehabilitasi sosial Bedah Rumah akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

NO	KECAMATAN / JENIS BANTUAN		TAHUN					JUMLAH
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	GEROKGAK							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	98	110	-	-	-	208
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	2	-	-	-	2
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	-	362	-	-	-	362
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	130	-	130
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	30	-	-	400	-	430
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	20	-	-	-	-	20
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	2	-	-	2
	8	CSR	77	1	-	-	-	78
2	SERIRIT							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	70	110	5	-	-	185
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	2	-	-	-	2
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	-	-	-	-	-	-
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	25	-	-	-	25
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	-	-	-	-	-	2
	7	BANTUAN KUBE (APBD II) + DEKON	-	-	7	-	-	7

	8	CSR	38	8	-	-	-	46
3	BUSUNGBIU							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	51	80	20	-	-	151
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	4	-	-	-	4
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	15	-	-	-	-	15
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	-	-	-	-	-
	6	BANTUAN KUBE (APBD I) + DEKON	1	-	22	-	-	23
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	1	5	-	-	-	6
	8	CSR	-	-	-	-	-	-
4	BANJAR							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	77	30	15	-	-	122
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	5	-	-	-	5
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	33	-	-	-	-	33
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	-		-	-	-	-
	6	BANTUAN KUBE (APBD I) + DEKON	-	-	-	-	-	-
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	4	4	-	8
	8	CSR	1	8	-	-	-	9
5	SUKASADA							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	41	52	10	-	-	103
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	2	6	-	-	-	8
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	-	-	-	-	-	-
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	-	-	-	-	-
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	3	-	-	10	-	13
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	3	5	2	4	-	14
	8	CSR	2	5	-	-	-	7
6	BULELENG							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	23	20	-	-	-	43
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	2	-	-	-	-	2
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	134	-	-	-	-	134
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	28	-	-	-	-	28
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	21	30	-	-	-	51
	6	BANTUAN KUBE (APBD I) + DEKON	21	-	52	60	-	133
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	17	10	-	27
	8	CSR	-	1	-	-	-	1
7	SAWAN							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	67	41	-	-	-	108
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	2	4	-	-	-	6
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	96	-	-	-	-	96
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	-	-	-

	5	BANTUAN KUBE (APBN)	21	-	-	-	-	21
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	3	-	-	-	-	3
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	3	-	1	-	4	8
	8	CSR	-	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHAN							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	42	19	-	-	-	61
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	4	-	-	-	4
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	239	-	-	-	-	239
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	12	-	-	-	-	12
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	42	-	-	-	-	42
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	15	-	-	-	-	15
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	-	4	4
	8	CSR	3	10	-	-	-	13
9	TEJAKULA							
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	24	10	5	-	-	39
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	-	2	-	-	-	2
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	203	245	-	-	-	448
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	-	-	-	70	-	70
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	-	-	-	300	-	300
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	-	-	-	-	-	-
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	-	-	-	2	2
	8	CSR	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN BULELENG								
	1	BEDAH RUMAH (APBD I)	493	472	55	-	-	1.020
	2	REHAB RUMAH (APBD II)	6	29	-	-	-	35
	3	BSPS BAGI MBR (KEMENPERA)	720	607	-	-	-	1.327
	4	RSRTLH (KEMENSOS)	40	-	-	200	-	240
	5	BANTUAN KUBE (APBN)	105	55	-	700	-	860
	6	BANTUAN KUBE (APBD I)	9	-	-	70	-	79
	7	BANTUAN KUBE (APBD II)	-	10	-	14	-	24
	8	CSR	121	33	-	-	-	154

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Jumlah kuota keluarga penerima manfaat Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.2
Jumlah Kuota Kabupaten Buleleng Tahun 2018 - 2020 Berdasarkan SP2D

No	Kecamatan	Januari - Agustus 2018	September 2018 - Maret 2019	April - Juli 2019	Agustus - Oktober 2019	Oktober	November	Desember	Januari 2020	Februari - Maret
1	BANJAR	4,788	4,716	4,716	4,678	4,678	4,678	4,846	4,911	4,871
2	BULELENG	4,184	4,148	4,148	4,134	4,134	4,134	4,205	4,309	4,135
3	BUSUNGBIU	2,397	2,267	2,267	2,256	2,256	2,256	2,273	2,281	2,260
4	GEROKGAK	6,443	6,356	6,355	6,305	6,299	6,305	6,413	6,978	6,705
5	SAWAN	3,288	3,173	3,173	3,097	3,087	3,097	3,237	5,032	4,607
6	SERIRIT	5,678	5,600	5,600	5,558	5,558	5,558	5,778	3,764	3,251
7	SUKASADA	3,835	3,745	3,745	3,729	3,729	3,729	3,935	6,141	5,937
8	KUBUTAMBAHAN	4,672	4,590	4,590	4,561	4,561	4,561	4,710	4,316	4,110
9	TEJAKULA	2,894	2,620	2,620	2,608	2,608	2,608	2,782	3,175	3,175
Jumlah Keseluruhan		**38,179**	**37,215**	**37,214**	**36,926**	**36,910**	**36,926**	**38,179**	**40,907**	**39,051**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.2.

Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Buleleng

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH TAHUN 2017	JUMLAH TAHUN 2018	JUMLAH TAHUN 2019
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Sembako	2.110 Paket	-	-
2	Pelatihan Keterampilan UEP	20 Orang	-	-
3	Kube APBD II	20 Orang	40 Orang	40 Orang

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pada tahun 2019 bantuan berasal dari APBD II dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PRSE sebanyak 40 Orang diberikan kepada Desa Padang Bulia, Desa Dencarik, Desa Kaliasem dan Desa Kalianget dengan membentuk satu kelompok per desa yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang.

Tabel 5.3.
Data Jumlah Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	GEROKGAK	17	8	25	17	8	25	17	8	25	10	6	16	9	3	12
2	SERIRIT	52	9	61	52	9	61	51	9	61	43	9	52	35	4	39
3	BUSUNGBIU	43	1	44	42	1	43	42	1	43	43	1	44	29	1	30
4	BANJAR	17	4	21	17	4	21	17	4	21	23	4	27	8	2	10
5	SUKASADA	29	3	32	28	3	31	26	3	31	26	3	29	23	2	25
6	BULELENG	13	7	20	13	7	20	13	7	20	34	5	39	27	3	30
7	SAWAN	19	1	20	19	1	20	19	1	20	15	-	15	24	-	24
8	KUBUTAMBAHAN	7	-	7	7	-	7	7	-	7	5	-	5	5	-	5
9	TEJAKULA	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	4	-	4
Jumlah		200	33	233	198	33	231	195	33	228	202	28	230	164	15	179

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Jumlah Veteran pejuang kemerdekaan di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan pada tahun 2019 dimana jumlah Veteran pejuang kemerdekaan laki-laki sebanyak 164 orang dan 15 orang perempuan, totalnya sebanyak 179 orang pejuang kemerdekaan.

Tabel 5.4.
Jumlah Penerima Bantuan Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Buleleng

No	Jenis Bantuan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	SEMBAKO	-	-	-	49	1	50	49	1	50	50	-	50	50	-	50
2	BINGKISAN HUT VETERAN	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BANTUAN BEDAH RUMAH	-	-	-	9	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**50**	**-**	**50**	**58**	**2**	**60**	**49**	**1**	**50**	**50**	**-**	**50**	**50**	**-**	**50**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pada tahun 2019 Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kabupaten Buleleng yang mendapatkan bantuan permakanan berupa sembako sebanyak 50 Veteran laki-laki.

5.2 BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

5.2.1 Program Dan Kegiatan Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
   a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
   b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
   c. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
   d. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti

2. Program pembinaan anak terlantar.
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
   a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
   b. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
   a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
   b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

5.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Terlantar di Kab. Buleleng Th. 2015 - 2019

No	Jenis Bantuan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	SEMBAKO	305	495	800	370	410	780	370	315	685	364	336	700	153	212	365
2	SERAGAM SEKOLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BANTUAN UEP	10	10	20	6	14	20	5	15	20	-	-	-	-	-	-
4	PENDAMPINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PKSA	-	-	-	262	327	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PELATIHAN KETERAMPILAN UEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	15	-	-	-
Jumlah		**315**	**505**	**820**	**638**	**751**	**1.389**	**375**	**330**	**705**	**373**	**342**	**715**	**153**	**212**	**365**

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.6.
Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Jenis Bantuan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	PELATIHAN KETERAMPILAN DAN BANTUAN UEP.	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
2	PENDAMPINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4	25	33	2	35
3	SEMBAKO TRC	-	-	-	2	7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	2	7	9	10	-	10	21	4	25	33	2	35

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.7.
Jumlah Penerima Bantuan Untuk Lansia Terlantar di Kab. Buleleng Th. 2015 - 2019

No	Jenis Bantuan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	SEMBAKO	300	500	800	150	300	450	440	460	900	164	286	450	206	214	420
2	BANTUAN UEP	10	10	20	9	11	20	-	20	20	-	-	-	-	-	-
3	RUJUKAN KE PANTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BANTUAN BEDAH KAMAR LANSIA	-	-	-	7	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		310	510	820	166	320	486	440	480	920	164	286	450	206	214	420

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.8.
Data Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2019 (APBD)

No	Kecamatan	Jumlah Penerima Tahun 2018		
		L	P	TOTAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	GEROKGAK	46	59	105
2	SERIRIT	-	-	-
3	BUSUNGBIU	-	-	-
4	BANJAR	21	54	75
5	SUKASADA	-	-	-
6	BULELENG	68	47	115
7	SAWAN	35	35	70
8	KUBUTAMBAHAN	17	8	25
9	TEJAKULA	14	11	25
Jumlah		201	214	415

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.9.
Data Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kedisabilitasan
Di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Jenis Kedisabilitasan / Kecamatan		Tahun														
			2015			2016			2017			2018			2019		
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	CACAT TUBUH		1.750	1.467	3.217	1.711	1.433	3.144	1.711	1.433	3.144	1.504	1.235	2.739	1.509	1.249	2.758
	1	GEROKGAK	258	236	494	253	233	486	253	233	486	223	199	422	226	198	124
	2	SERIRIT	208	198	406	203	194	397	203	194	397	193	152	345	191	153	347
	3	BUSUNGBIU	111	67	178	105	66	171	105	66	171	89	59	148	90	59	149
	4	BANJAR	159	140	299	153	136	289	153	136	289	124	127	251	124	130	254
	5	SUKASADA	266	157	423	261	155	416	261	155	416	220	142	362	224	143	367
	6	BULELENG	271	262	533	273	254	527	273	254	527	242	217	459	241	220	461
	7	SAWAN	165	126	291	161	121	282	161	121	282	143	103	246	143	106	249
	8	KUBUTAMBAHAN	171	160	331	165	157	322	165	157	322	155	128	283	154	130	284
	9	TEJAKULA	141	121	262	137	117	254	137	117	254	115	108	223	116	110	226
2	CACAT NETRA		255	126	381	209	137	346	209	137	346	182	193	375	182	195	377
	1	GEROKGAK	40	20	60	25	29	54	25	29	54	25	28	53	30	29	59
	2	SERIRIT	35	15	50	30	19	49	30	19	49	30	19	49	50	32	49
	3	BUSUNGBIU	27	18	45	25	15	40	25	15	40	25	15	40	26	20	46
	4	BANJAR	26	14	40	20	16	36	20	16	36	20	16	36	26	20	50
	5	SUKASADA	35	11	46	32	10	42	32	10	42	31	10	41	32	11	43
	6	BULELENG	30	13	43	20	17	37	20	17	37	20	17	37	22	17	39
	7	SAWAN	20	10	30	19	8	27	19	8	27	8	27	35	10	30	40
	8	KUBUTAMBAHAN	22	10	32	18	11	29	18	11	29	11	29	40	11	30	41
	9	TEJAKULA	20	15	35	20	12	32	20	12	32	12	32	44	13	35	48
3	TUNA RUNGU		123	50	173	102	43	145	102	43	145	102	47	149	104	48	152
	1	GEROKGAK	15	5	20	15	4	19	15	4	19	15	5	20	16	6	22
	2	SERIRIT	15	10	25	12	8	20	12	8	20	12	8	20	15	10	25
	3	BUSUNGBIU	19	4	23	15	5	20	15	5	20	15	6	21	17	9	26
	4	BANJAR	15	5	20	10	8	18	10	8	18	10	8	18	14	8	22
	5	SUKASADA	10	7	17	12	3	15	12	3	15	12	4	16	10	4	14
	6	BULELENG	13	2	15	8	2	10	8	2	10	8	2	10	12	6	18
	7	SAWAN	12	6	18	10	4	14	10	4	14	10	4	14	10	8	18
	8	KUBUTAMBAHAN	15	5	20	9	7	16	9	7	16	9	7	16	11	8	19
	9	TEJAKULA	9	6	15	11	2	13	11	2	13	11	3	14	15	4	19
4	TUNA WICARA		154	61	215	132	64	196	132	64	196	132	60	192	132	62	194
	1	GEROKGAK	20	12	32	20	11	31	20	11	31	20	10	30	21	11	32
	2	SERIRIT	25	5	30	17	10	27	17	10	27	17	10	27	18	11	29
	3	BUSUNGBIU	10	10	20	10	8	18	10	8	18	10	7	17	10	10	20
	4	BANJAR	18	6	24	18	4	22	18	4	22	18	4	22	20	6	26
	5	SUKASADA	20	10	30	20	5	25	20	5	25	20	4	24	14	8	22
	6	BULELENG	15	5	20	11	8	19	11	8	19	11	8	19	15	6	21
	7	SAWAN	13	6	19	13	5	18	13	5	18	13	5	18	14	3	17
	8	KUBUTAMBAHAN	17	4	21	12	8	20	12	8	20	12	7	19	12	6	18
	9	TEJAKULA	16	3	19	11	5	16	11	5	16	11	5	16	102	40	142
5	EKS PENYAKIT KRONIS		110	40	150	101	39	140	101	39	140	101	38	139	122	46	168
	1	GEROKGAK	16	4	20	12	7	19	12	7	19	12	7	19	14	8	22
	2	SERIRIT	12	6	18	10	6	16	10	6	16	10	6	16	11	7	18
	3	BUSUNGBIU	8	6	14	11	2	13	11	2	13	11	2	13	14	4	18

	4	BANJAR	15	3	18	12	5	17	12	5	17	12	5	17	15	5	20
	5	SUKASADA	11	4	15	13	1	14	13	1	14	13	1	14	16	3	19
	6	BULELENG	17	5	22	14	7	21	14	7	21	14	6	20	16	6	22
	7	SAWAN	8	3	11	9	1	10	9	1	10	9	1	10	10	2	12
	8	KUBUTAMBAHAN	12	2	14	9	4	13	9	4	13	9	4	13	11	4	15
	9	TEJAKULA	11	7	18	11	6	17	11	6	17	11	6	17	15	7	22
6	CACAT MENTAL		255	106	361	240	102	342	240	102	342	237	99	336	239	100	339
	1	GEROKGAK	34	16	50	30	15	45	30	15	45	29	15	44	30	16	46
	2	SERIRIT	30	13	43	35	7	42	35	7	42	35	6	41	40	7	47
	3	BUSUNGBIU	30	10	40	29	10	39	29	10	39	28	10	38	30	11	41
	4	BANJAR	35	15	50	30	17	47	30	17	47	30	16	46	32	20	52
	5	SUKASADA	30	5	35	24	10	34	24	10	34	24	10	34	30	11	41
	6	BULELENG	32	20	52	29	20	49	29	20	49	28	20	48	30	21	51
	7	SAWAN	20	9	29	20	7	27	20	7	27	20	7	27	21	7	28
	8	KUBUTAMBAHAN	23	10	33	22	10	32	22	10	32	22	9	31	24	10	34
	9	TEJAKULA	21	8	29	21	6	27	21	6	27	21	6	27	22	7	29
7	EKS PSIKOTIK		94	42	136	90	31	121	90	31	121	89	30	119	90	31	121
	1	GEROKGAK	16	4	20	11	8	19	11	8	19	11	8	19	12	8	20
	2	SERIRIT	15	6	21	16	2	18	16	2	18	16	2	18	17	4	21
	3	BUSUNGBIU	12	7	19	13	4	17	13	4	17	13	4	17	16	6	22
	4	BANJAR	10	5	15	12	2	14	12	2	14	12	2	14	14	4	18
	5	SUKASADA	8	2	10	5	4	9	5	4	9	5	4	9	6	6	12
	6	BULELENG	10	2	12	13	3	16	13	3	16	13	2	15	16	4	20
	7	SAWAN	8	6	14	7	5	12	7	5	12	7	5	12	10	6	16
	8	KUBUTAMBAHAN	9	6	15	8	2	10	8	2	10	8	2	10	10	3	13
	9	TEJAKULA	6	4	10	5	1	6	5	1	6	4	1	5	6	1	7
8	CACAT GANDA		269	179	448	256	163	419	256	163	419	278	232	510	280	234	514
	1	GEROKGAK	42	33	75	39	30	69	39	30	69	45	34	79	50	36	86
	2	SERIRIT	36	25	61	35	22	57	35	22	57	41	27	68	42	27	69
	3	BUSUNGBIU	24	17	41	24	15	39	24	15	39	26	21	47	30	24	54
	4	BANJAR	25	14	39	23	17	40	23	17	40	25	27	52	26	28	54
	5	SUKASADA	25	17	42	29	14	43	29	14	43	29	25	54	34	30	64
	6	BULELENG	33	26	59	35	17	52	35	17	52	33	30	63	30	23	53
	7	SAWAN	27	14	41	27	14	41	27	14	41	27	23	50	29	24	53
	8	KUBUTAMBAHAN	31	21	52	25	18	43	25	18	43	29	23	52	30	21	51
	9	TEJAKULA	26	12	38	19	16	35	19	16	35	23	22	45	24	22	46

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.10.
Jumlah Penerima Bantuan Untuk Anak Dengan Kedisabilitasan di Kab. Buleleng
Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	BANTUAN ALAT BANTU	51	31	82	63	36	99	57	44	101	61	57	118	28	42	70
2	SEMBAKO	12	13	25	120	82	202	112	107	219	116	107	223	36	29	65
3	BANTUAN ASPD-B	41	49	90	42	27	69	37	31	68	32	27	59	201	108	309
4	RUJUKAN	4	2	6	2	1	3	8	7	15	12	9	21	26	24	50
5	DLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		108	95	203	227	146	373	214	189	403	221	200	421	301	203	435

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.11.
Jumlah Penerima Bantuan dan Pelayanan Untuk Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	SEMBAKO	210	140	350	410	370	780	160	140	300	-	-	550	318	192	510
2	BANTUAN UEP	85	65	150	61	51	112	20	10	30	-	-	49	26	24	50
3	RUJUKAN KE PANTI	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PELATIHAN KETERAMPILAN PIJAT	10	5	15	8	7	15	-	-	-	-	-	2	-	-	2
5	PELATIHAN KETERAM[PILAN VOKASIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DLL	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		306	210	516	481	428	909	180	150	330	-	-	601	344	216	560

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.12.
Data Penyandang Disabilitas Yang Menerima Bantuan Alat Bantu Th. 2015 - 2019

NO	KECAMATAN / NAMA BANTUAN ALAT BANTU		TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	GEROKGAK						
	1	KURSI RODA	6	16	23	21	10
	2	TONGKAT KETIAK	2	6	5	2	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	1	-	1	-
	4	PROTHESA	-	-	-	2	-
	5	BRACE	-	-	-	1	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	1	2	-	2	-
	7	DLL	-	-	1	-	-
2	SERIRIT						
	1	KURSI RODA	8	11	24	11	22
	2	TONGKAT KETIAK	7	8	1	2	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	-	-	2	2
	4	PROTHESA	1	-	-	2	-
	5	BRACE	2	2	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	2	3	-	2	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
3	BUSUNGBIU						
	1	KURSI RODA	4	8	4	9	-
	2	TONGKAT KETIAK	3	5	-	-	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	-	-	5	5
	4	PROTHESA	1	1	-	1	-
	5	BRACE	-	2	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	2	2	-	1	1
	7	DLL	-	-	-	3	-
4	BANJAR						
	1	KURSI RODA	12	17	10	18	2
	2	TONGKAT KETIAK	8	8	3	3	-
	3	TONGKAT PUTIH	2	1	-	1	-
	4	PROTHESA	-	-	-	1	-
	5	BRACE	-	-	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	-	2	5	2	2
	7	DLL	-	-	-	-	-
5	SUKASADA						
	1	KURSI RODA	11	8	21	13	9
	2	TONGKAT KETIAK	2	4	1	4	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	-	-	1	2
	4	PROTHESA	2	-	-	-	-
	5	BRACE	-	-	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	2	1	-	2	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
6	BULELENG						
	1	KURSI RODA	15	16	38	19	13
	2	TONGKAT KETIAK	4	4	1	2	-
	3	TONGKAT PUTIH	1	1	-	10	1
	4	PROTHESA	1	2	-	-	-
	5	BRACE	-	-	-	2	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	4	3	2	11	7
	7	DLL	-	-	-	-	-

7	SAWAN						
	1	KURSI RODA	9	12	7	9	10
	2	TONGKAT KETIAK	2	4	-	1	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	-	-	1	-
	4	PROTHESA	2	1	-	-	-
	5	BRACE	1	-	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	2	1	-	4	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHAN						
	1	KURSI RODA	10	11	7	14	1
	2	TONGKAT KETIAK	3	2	4	2	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	1	-	1	-
	4	PROTHESA	-	-	-	-	-
	5	BRACE	-	2	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	4	2	3	1	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
9	TEJAKULA						
	1	KURSI RODA	14	15	11	6	-
	2	TONGKAT KETIAK	2	5	-	1	-
	3	TONGKAT PUTIH	-	1	-	-	-
	4	PROTHESA	3	4	-	1	-
	5	BRACE	2	8	-	-	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	-	1	-	2	-
	7	DLL	-	-	-	-	-
JUMLAH							
	1	KURSI RODA	89	114	145	121	50
	2	TONGKAT KETIAK	33	46	15	17	-
	3	TONGKAT PUTIH	3	5	-	22	10
	4	PROTHESA	10	8	-	7	-
	5	BRACE	5	14	-	3	-
	6	ALAT BANTU DENGAR	17	17	10	29	10
	7	DLL	-	-	1	-	-

Tabel 5.13.
Data Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental Yang Telah Menerima
Bantuan Jaminan Sosial Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penerima		
		ASPD Berat (APBN)	ASPD Berat (APBD)	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	GEROKGAK	77	16	93
2	SERIRIT	10	10	20
3	BUSUNGBIU	21	11	32
4	BANJAR	52	9	61
5	SUKASADA	3	10	13
6	BULELENG	71	17	88
7	SAWAN	60	6	66

8	KUBUTAMBAHAN	7	10	17
9	TEJAKULA	-	11	11
Jumlah		301	100	401

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.14.

Jumlah Gelandangan Yang Dipulangkan Ke Daerah Asal Tahun 2015 - 2019

No	Desa / Kelurahan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	PEDAHAN	2	3	5	4	9	13	-	-	-	4	6	10	-	-	-
2	MUNTI	3	4	7	2	4	6	-	-	-	23	10	33	-	-	-
3	DLL	-	-	-	-	-	-	15	1	16	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	7	12	6	13	19	15	1	16	27	16	43	-	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.15.
Jumlah Pengemis Yang Di Razia Tim Yustisi Dan Dipulangkan Ke Daerah Asal
Tahun 2015 - 2019

No	Desa / Kelurahan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	PEDAHAN	2	3	5	4	9	13	-	-	-	4	6	10	19	39	58
2	MUNTI	3	4	7	2	6	8	-	-	-	23	10	33	-	-	-
3	DLL	-	-	-	-	-	-	4	36	40	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	7	12	6	15	21	4	36	40	27	16	43	19	39	58

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

5.3 BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.3.1 Program Dan Kegiatan Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya.
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
   b. Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

5.3.2 Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2018

Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.16.
Data Kelengkapan Sarana Penanggulangan Bencana Dinas Sosial
Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	GUDANG BENCANA	1	-	-	-	-
2	MOBIL RESCUE	-	-	-	-	-
3	MOBIL DUMLAP	1	-	-	-	-

4	SPD MTR TRAIL	-	-	1	-	-
5	PERAHU	-	-	-	-	-
6	TRUK RESCUE	-	-	-	-	-
7	PLAMPUNG	-	-	-	-	-
8	KAMPUNG SIAGA BENCANA	1	1	-	1	1
9	DLL	-	-	-	-	-
Jumlah		3	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.17.
Data Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN		JENIS BENCANA										
			BENCANA ALAM								BENCANA SOSIAL		
			BANJIR	LONGSOR	ANGIN PUTING BELIUNG	GEMPA BUMI	AIR LAUT PASANG	KEBAKARAN	SUNAMI	DLL	BENTROK ANTAR BANJAR	BENTROK ANTAR DESA/KEL.	TAWURAN REMAJA
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	GEROKGAK												
	1	Desa Tukadsumaga	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Celukanbawang	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tinga Tinga	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Pengulon	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Patas	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Gerokgak	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Sanggalangit	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Musi	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Penyabangan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Banyupoh	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Pemuteran	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Pejarakan	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-
	13	Desa Sumberkima	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Sumberklampok	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-
2	SERIRIT												
	1	Desa Kalianget	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Joanyar	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tangguwisia	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Sulanyah	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	5	Kel. Seririt	√	-	-	-	√	√	√	-	-	-	-
	6	Desa Pengastulan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Patemon	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-
	8	Desa Lokapaksa	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Umeanyar	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Banjarasem	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kalisada	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Pangkungparuk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Ularan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Unggahan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Bubunan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Desa Ringdikit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	Desa Rangdu	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	Desa Mayong	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	Desa Bestala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	Desa Munduk Bestala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	21	Desa Gunung Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	BUSUNGBIU												
	1	Desa Busungbiu	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Kedis	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Subuk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tinggar Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Titab	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Telaga	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Sepang Kelod	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Sepang	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Bongan Cina	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Tista	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Puncak Sari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Kekeran	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Bengkel	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Pelapuan	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Umejero	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BANJAR												
	1	Desa Kaliasem	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Temukus	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Tigawasa	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tampekan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Dencarik	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Banjar Tegeha	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Banjar	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Pedawa	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Banyuseri	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Tirtasari	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kayuputih	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Banyuatis	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Gesing	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Munduk	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Cempaga	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Desa Sidatapa	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUKASADA												
	1	Kel. Sukasada	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Padangbulia	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Pegayaman	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Gitgit	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Wanagiri	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Pancasari	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Silangjana	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Pegadungan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Sambangan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Panji	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Panji Anom	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Tegallinggah	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Selat	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Desa Kayuputih	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Desa Ambengan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BULELENG												
	1	Desa Petandakan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Jinangdalem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Poh Bergong	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Alasangker	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Penglatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Kel. Penarukan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	7	Kel. Banyuning	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	8	Kel. Astina	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Kel. Kendran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Kel. Kampung Singaraja	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Kel. Liligundi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	12	Kel. Paket Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	Kel. Banjar Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Kel. Banjar Bali	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Kel. Kampung Kajanan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Kel. Kampung Bugis	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	17	Kel. Kampung Baru	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	18	Kel. Kampung Anyar	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	19	Kel. Kaliuntu	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	Kel. Banjar Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	Kel. Beratan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	Kel. Banyuasri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	Desa Bakti Seraga	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	Desa Pemaron	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
	25	Desa Tukad Mungga	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	26	Desa Anturan	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	27	Desa Kalibukbuk	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	28	Desa Sari Mekar	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	Desa Nagasepaha	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SAWAN												
	1	Desa Bungkulan	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Jagaraga	-	-	√		-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Menyali	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Sawan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Bebetin	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Sekumpul	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Galungan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Sudaji	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Suwug	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Sinabun	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Kerobokan	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Sangsit	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	13	Desa Giri Emas	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
8	KUBUTAMBAHAN												
	1	Desa Kubutambahan	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Bengkala	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Bila	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Tamblang	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Bontihing	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Pakisan	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Tajun	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Mangening	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Depeha	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Bulian	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	Desa Tambakan	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	Desa Bukti	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
9	TEJAKULA												
	1	Desa Pacung	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	2	Desa Julah	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	3	Desa Sembiran	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	Desa Les	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Desa Bondalem	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	6	Desa Tejakula	√	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-
	7	Desa Madenan	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Desa Penuktukan	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	9	Desa Sambirenteng	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-
	10	Desa Tembok	√		-	-	√	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.18.
Jumlah Korban Bencana Alam yang Memperoleh Bantuan Sosial
Di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEMBAKO (BERAS, KECAP, SARDEN, SAOS, MINYAK GORENG, MIE INSTAN)	1.172 KK	637 KK	2.110 KK	3.955 KK	2.271 KK	10.145 KK
2	PERALATAN DAPUR	32 KK	68 KK	139 KK	46 KK	36 KK	321 KK
3	BAJU KAOS DEWASA	462 KK	12 KK	-	-	-	474 KK
4	KAIN SARUNG	144 KK	10 KK	50 KK	20 KK	10 KK	234 KK
5	KAIN DASTER	511 KK	12 KK	50 KK	-	-	573 KK
6	KAIN BATIK	413 KK	-	-	-	-	413 KK
7	SELIMUT	70 KK	-	199 KK	398 KK	-	667 KK
8	PAKAIAN SERAGAM SD	127 KK	175 KK	288 KK	222 KK	-	812 KK
9	FOOD WARE	-	-	-	-	-	-
10	KID WARE	6 KK	-	40 KK	-	20 KK	66 KK
11	VELTBED	-	1 KK	-	-	-	1 KK
12	TIKAR	-	-	-	-	-	-
13	MATRAS	441 KK	79 KK	133 KK	84 KK	28 KK	765 KK
14	TENDA BIRU (TERPAL)	43 KK	53 KK	60 KK	88 KK	18 KK	262 KK
JUMLAH		3.421 KK	1.047 KK	3.069 KK	4.813 KK	2.383 KK	14.733 KK

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.19.
Jumlah Korban Bencana Sosial Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

NO	JENIS BANTUAN	TAHUN					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEMBAKO (BERAS, KECAP, SARDEN, SAOS, MINYAK GORENG)	52 KK	-	-	-	-	52 KK
2	KAIN SARUNG	12 KK	-	-	-	-	12 KK
3	KAIN BATIK	40 KK	-	-	-	-	40 KK
4	DASTER	30 KK	-	-	-	-	30 KK

5	BAJU KAOS DEWASA	30 KK	-	-	-	-	30 KK
6	HANDUK	30 KK	-	-	-	-	30 KK
7	TIKAR	30 KK	-	-	-	-	30 KK
8	MATRAS	10 KK	-	-	-	-	10 KK
9	TENDA BIRU (TERPAL)	40 KK	-	-	-	-	40 KK
10	KESERASIAN SOSIAL	5 Desa	-	-	-	-	5 Desa

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.20.
Data Penerima Bantuan Santunan Kematian Masyarakat Miskin (SANTIMAS) di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun															Total		
		2015			2016			2017			2018			2019					
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	GEROKGAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SERIRIT	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7	10	17	8	7	15	17	17	34
3	BUSUNGBIU	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2
4	BANJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10	1	-	1	8	3	11
5	SUKASADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
6	BULELENG	-	-	-	-	-	-	18	12	30	7	3	10	5	3	8	30	18	48
7	SAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1	6	6	3	9
8	KUBUTAM BAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	TEJAKULA	-	-	-	-	-	-	4	3	7	3	7	10	10	8	18	17	18	35
Jumlah		-	-	-	-	-	-	25	15	40	25	25	50	30	20	50	90	50	140

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.21.
Data Keluarga Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Buleleng Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Tahun														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	GEROKGAK	2	266	268	30	1.084	1.114	-	-	1.095	-	-	5.053	-	-	4.845
2	SERIRIT	25	378	403	77	1.821	1.898	-	-	1.841	-	-	4.069	-	-	3.879
3	BUSUNGBIU	4	216	220	23	908	931	-	-	919	-	-	1.644	-	-	1.578
4	BANJAR	47	1.376	1.423	75	1.739	1.814	-	-	1.765	-	-	3.526	-	-	3.409
5	SUKASADA	27	658	685	67	1.392	1.459	-	-	1.421	-	-	2.750	-	-	2.646
6	BULELENG	3	503	506	57	1.430	1.487	-	-	1.450	-	-	2.830	-	-	2.689
7	SAWAN	2	232	234	18	854	872	-	-	863	-	-	2.224	-	-	2.107

8	KUBUTAMBAHAN	2	229	231	29	946	975	-	-	943	-	-	2.906	-	-	2.771
9	TEJAKULA	14	187	201	38	736	774	-	-	754	-	-	1.982	-	-	1.893
Jumlah		126	4.045	4.171	414	10.910	11.324	-	-	11.051	-	-	26.984	-	-	25.817

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Pada tahun 2018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 26.984 sedangkan pada tahun 2019 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 25.817.

Tabel 5.22.
Data Kepesertaan Per-Segmen s/d 31 Desember 2019

Data Kepesertaan Per-Segmen s/d 31 Desember 2019		
Kepesertaan	Jenis Kepesertaan	KC Singaraja
		Buleleng
		Aktif
PBI APBN	PBI APBN	236.710
PBI APBD	PBI APBD	316.589

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

5.4 UPTD MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN

5.4.1 Program Dan Kegiatan UPTD Monumen Dan Tugu Perjuangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial
   Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan

5.4.2 Realisasi Program dan Kegiatan UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

Realisasi Program dan Kegiatan pada UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan akan disampaikan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 5.23.
Data Taman Makam Pahlawan (TMP), Monumen Dan Tugu Perjuangan Yang Diserahkan Dan Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng

NO	NAMA TMP, MONUMEN/TUGU	LUAS AREA	LOKASI / ALAMAT		KONDISI	DIBANGUN TAHUN	KETERANGAN
			DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	TAMAN MAKAM PAHLAWAN " CURASTANA" SINGARAJA	6.350 M2	Kel. Banjar Tegal	Buleleng	baik dan terawat	Rehab Tahun 2015	TMP Kab. Buleleng dengan jumlah makam sebanyak 471 Buah
2	MONUMEN "BHUANA KERTA"	12.350 M2	Desa Panji	Sukasada	baik dan terawat	Tahun 1945, 2014	Tonggak sejarah perjuangan rakyat Buleleng melawan penjajah Belanda tahun 1945
3	MONUMEN " PERANG JAGARAGA"	5.550 M2	Desa Jagaraga	Sawan	baik dan terawat	Tahun 2016	Tonggak sejarah perjuangan rakyat Raja Buleleng melawan penjajah Belanda tahun 1849
4	MONUMEN "TRI YUDHA SAKTI"	4.100 M2	Kelurahan Sukasada	Sukasada	baik dan terawat	Tahun Awal 1998, Akhir 2008	Monumen Mengenang jasa Pejuang Kemerdekaan Buleleng melawan Penjajah Belanda yaitu : Letkol I Gusti Putu Wisnu, Kapten I Gede Muka Pandan, Mayor I Nengah Metra

5	MONUMEN PERJUANGAN MARKAS " AYODYA PURA"	550 M2	Desa Selat	Sukasada	baik dan belum terawat	05 May 2014	Monumen Markas Perjuangan Rakyat Buleleng melawan Penjajah Belanda yang dipimpin langsung oleh Mayor Metra
6	TUGU PERJUANGAN GITGIT (Monumen Wira Bhuana belum selesai sertifikasi)	-	Desa Gitgit	Sukasada	baik dan belum terawat	10 Agustus 1968	Tonggak sejarah perjuangan rakyat Buleleng melawan penjajah Belanda tanggal 12 Mei 1946

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Tabel 5.24.

Data Monumen Dan Tugu Perjuangan Yang Belum Diserahkan Dan Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng

NO	NAMA TMP, MONUMEN/TUGU	LUAS AREA	LOKASI / ALAMAT		KONDISI	DIBANGUN TAHUN	KETERANGAN
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Monumen Peringatan Perjuangan	-	Desa Kedis	Busungbiu	Rusak Ringan	Diresmikan, 20 Mei 1979	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat
2	Monumen Kusuma Yuda	-	Desa Tinggarsari	Busungbiu	Masih Layak	Diresmikan, 17 Agustus 2009	Diperingati setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun dilaksanakan upacara bendera, pujawalinya dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus, setiap tahun
3	Monumen Desa Banjarasem	-	Desa Banjarasem	Seririt	Cukup Baik	-	Mengenang perjuangan di Desa Banjarasem
4	Monumen Desa Joanyar	-	Desa Joanyar	Seririt	Cukup Baik	-	Mengenang perjuangan di Desa Joanyar
5	Monumen Tugu Perjuangan	-	Desa Pelapuan	Busungbiu	Belum Sempurna	Diresmikan, 20 Mei 2008	Mengenang sejarah perjuangan dan para pejuang

6	Monumen Tugu Lila Pancha Graha	4 M2	Desa Pakisan	Kubutambahan	Rusak	Diresmikan, Hari Sabtu, 30 Nopember 2002	Mengenang para pejuang yang gugur: Pan Ropen, Pan Ginarsa, I Swarandia, I Santa, I Kandel, I Metre/Meter, Pan Teka, I Tinggal
7	Monumen Kusuma Mandala	-	Desa Bubunan	Seririt	Baik	Diresmikan, 01 Oktober 1996	Mengenang sejarah perjuangan Desa Bubunan tanggal 06 April yang gugur: Nengah Sumandra, Wayan Sada, Ketut Suweca
8	Monumen Kusuma Mandala	-	Desa Bestala	Seririt	Baik	Diresmikan, 20 - 05 -1989	Mengenang sejarah perjuangan: Made Anila, Ketut Mudana, Putu Sedana, Made Cana, Nyoman Sumada
9	Monumen Kusuma Yudha	25 M2	Desa Ringdikit	Seririt	Baik	Diresmikan, 17 Agustus 1995	Mengenang para pejuang yang gugur: J. Willem, Mr. X, I Dewa Made Rai, I Gusti Agung Putra (Maruti), Mukadis, I Gede Rai, Sulandra, Dewa Putu Sumpena, Gede Tantri
10	Monumen Peringatan Perjuangan	-	Desa Busungbiu	Busungbiu	Rusak Berat	Diresmikan, 17 Agustus 1979	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Busungbiu, yang gugur: Wirta, I Ketut Sajeng, I Nyoman Mandera, I Ketut Wita
11	Monumen Tugu Perjuangan Desa Sepang	-	Sepang	Busungbiu	Rusak Berat	-	Mengenang sejarah perjuangan masy. desa sepang
12	Monumen Pura Perjuangan	-	Pelapuan	Busungbiu	Baik	Diresmikan, 17 Agustus 2010	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat desa Pelapuan

13	Monumen Desa Pangkung Paruk	-	Pangkungparuk	Seririt	Cukup Baik	Diresmikan, tahun 1935	Tempat penyingkiran
14	Monumen Pan Janji	9 M2	Tunjung	Busungbiu	Setengah Rusak	Diresmikan, 01 Januari 1993	Mengenang para pejuang yang gugur: Pan Janji dan Moyo
15	Monumen Nyoman Rumada	-	Tamblang	Kubutambahan	Cukup Baik	Diresmikan, 17 Agustus 2014	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Tamblang yang gugur: Nyoman Rumada, Kubayan Siti
16	Monumen Sthana Wira Yudha	9 M2	Depeha	Kubutambahan	Sedikit Rusak	Diresmikan, 19 Maret 2003	Mengenang para pejuang yang gugur: I Gede Ngurah, I Wayan Gina
17	Monumen Giri Satrya Yudha Bhakti	-	Bontihing	Kubutambahan	Baik	Diresmikan, 24 Januari 2016	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Bontihing tanggal 17 Agustus 1946, yang gugur : Lettu Jedeng, Pan Liadi dan Wayan Turun
18	Monumen Ista Yudha Pahala	2 Are	Penuktukan	Tejakula	Baik	Diresmikan, 10 Januari 2001	Mengenang sejarah penangkapan Shodanco N. Melaya oleh tentara jepang tanggal 15 Desember 1945, Nica mengurung dan membakar beberapa rumah markas pemuda pimpinan Shodanco N. Melaya, tanggal 22 Mei 1946 gugur 1 orang :Nengah Nagi
19	Monumen Dharma Yudha Mandala	20 Are	Bondalem	Tejakula	Baik dan perlu ditata lagi	Diresmikan, 30 April 1992	Memperingati pertempuran 1 Mei 1946 antara pejuang se-Kecamatan

							Tejakula melawan NICA dan AP gugur 29 orang pejuang
20	Monumen Tugu Perjuangan Wira Wijaya Sakti	-	Galungan	Sawan	Cukup Baik	-	-

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

DATA MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN DI KABUPATEN BULELENG

MONUMEN PERINGATAN PERJUANGAN

Diresmikan	:	20 Mei 1979
Lokasi	:	Desa Kedis Kec. Busungbiu
Maksud	:	Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Patung
Pengelola	:	Pemerintah Desa Kedis
Kondisi monument	:	Rusak ringan
Sumber data	:	Sesepuh/Pelaku Perjuangan Kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat

MONUMEN KUSUMA YUDA

Diresmikan	:	17 Agustus 2009
Lokasi	:	Desa Tinggarsari Kec. Busungbiu
Maksud	:	Untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan
Bentuk fisik	:	Patung dan Pura Pejuang
Pengelola	:	Warga masyarakat dusun kapas jawa Ds. Tinggarsari
Kondisi monument	:	Masih layak
Sumber data	:	Sesepuh/Pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	:	Diperingati setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun dilaksanakan upacara bendera, pujawalinya dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun

MONUMEN DESA BANJARASEM

Diresmikan	:	-
Lokasi	:	Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjarasem Kec. Seririt
Maksud	:	Mengenang perjuangan di Desa Banjarasem
Bentuk fisik	:	Tugu
Pengelola	:	Desa Banjarasem

Kondisi monument	:	Cukup Baik
Sumber data	:	LVRI Anak Ranting Desa Banjarasem
Keterangan monument	:	-

MONUMEN DESA JOANYAR

Diresmikan	:	-
Lokasi	:	Desa Joanyar
Maksud	:	Mengenang Perjuangan di Desa Joanyar Kec. Seririt
Bentuk fisik	:	Patung
Pengelola	:	Pemerintah Desa Joanyar
Kondisi monument	:	Cukup Baik
Sumber data	:	-
Keterangan monument	:	-

MONUMEN TUGU PERJUANGAN

Diresmikan	:	20 Mei 2008
Lokasi	:	Desa Pelapuan Kec. Busungbiu
Maksud	:	Disini para pejuang bermarkas dan mengucapkan kaul
Bentuk fisik	:	Patung dan Pura
Pengelola	:	Warga masyarakat Dusun Pasut Nangka
Kondisi monument	:	Belum sempurna
Sumber data	:	Sesepuh/Pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan dan para pejuang Berkaul diantaranya: 1. Made Sangka (Pak Germong) 2. Made Toya 3. Sanusi 4. Pak Sahri alias Pak Bedugul (Jawa) 5. Pak Jiwa

MONUMEN TUGU LILA PANCHA GRAHA

Diresmikan	:	Hari Sabtu, 30 Nopember 2002
Lokasi	:	Desa Pakisan Kec. Kubutambahan
Maksud	:	Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Kurang baik, 2 x 2 meter persegi
Pengelola	:	Pemerintahan desa
Kondisi monument	:	Rusak
Sumber data	:	LVRI Anak Ranting Desa Pakisan
Keterangan monument	:	Mengenang para pejuang yang gugur:

1. Pan Ropen
2. Pan Ginarsa
3. I Suwarandia
4. I Santa
5. I Kandel
6. I Metra/Meter
7. Pan Teka
8. I Tinggal

MONUMEN KUSUMA MANDALA

Diresmikan	:	Tanggal 01 Oktober 1996
Lokasi	:	Banjar Dinas Tunjung Mekar, Desa Bubunan Kec. Seririt
Maksud	:	Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Tugu
Pengelola	:	Pemerintah Desa Bubunan
Kondisi monument	:	Baik
Sumber data	:	LVRI Anak Ranting Desa Bubunan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan Desa Bubunan Tanggal 06 April yang gugur:

1. Nengah Sumandra
2. Wayan Sada
3. Ketut Suweca

MONUMEN KUSUMA MANDALA

Diresmikan	:	Tanggal 20 - 05 - 1989
Lokasi	:	Banjar Dinas Taman, Desa Bestala Kec. Seririt
Maksud	:	Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Patung
Pengelola	:	Pemerintah Desa Bestala
Kondisi monument	:	Baik
Sumber data	:	Sesepuh pejuang kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan:

1. Made Anila (04-04-1946)
2. Ketut Mudana (25-06-1946)
3. Putu Sedana (05-05-1947)
4. Made Cana (1948)
5. Nyoman Sumada (31-07-1978)

MONUMEN KUSMUMA YUDHA

Diresmikan	:	17 Agustus 1995
Lokasi	:	Desa Ringdikit
Maksud	:	Untuk mengenang perjuangan di Desa Ringdikit Kec. Seririt
Bentuk fisik	:	5 x 5 M2
Pengelola	:	Pemerintah Desa Ringdikit
Kondisi monument	:	Baik
Kondisi prasarana	:	Rusak
Sumber data	:	LVRI Anak Ranting Desa Ringdikit
Keterangan monument	:	Mengenang para pejuang yang gugur:

1. J. Willem
2. Mr. X
3. I Dewa Made Rai
4. I Gusti Agung Putra (Maruti)
5. Mukadis
6. I Gede Rai

7. Sulandra
8. Dewa Putu Sumpena
9. Gede Tantri

MONUMEN PERINGATAN PERJUANGAN

Diresmikan	:	17 Agustus 1979
Lokasi	:	Desa Busungbiu Kec. Busungbiu
Maksud	:	Mengenang pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Patung
Pengelola	:	Pemerintah Desa Busungbiu
Kondisi monument	:	Rusak berat
Sumber data	:	Sesepuh / pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Busungbiu, yang gugur: 1. Wirta 2. I Ketut Sajeng 3. I Nyoman Mandera 4. I Ketut Wita

MONUMEN WIRA BHUANA

Diresmikan	:	-
Lokasi	:	Jalan Raya Singaraja - Denpasar (Desa Gitgit)
Maksud	:	Mengenang perjuangan
Bentuk fisik	:	Tugu
Pengelola	:	Swadaya
Kondisi monument	:	Sedang
Sumber data	:	Markas cabang LVRI Kabupaten Buleleng
Keterangan monument	:	Pertempuran antara pemuda pejuang dengan serdadu NICA tanggal 12 Mei 1946, 9 orang pemuda pejuang gugur

MONUMEN TUGU PERINGATAN PERJUANGAN DESA SEPANG

Diresmikan	:	-
Lokasi	:	Desa Sepang Kec. Busungbiu
Maksud	:	Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Patung
Pengelola	:	Pemerintah Desa Sepang
Kondisi monument	:	Rusak Berat
Sumber data	:	Sesepuh/pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Sepang

MONUMEN PURA PERJUANGAN

Diresmikan	:	17 Agustus 2010
Lokasi	:	Desa Pelapuan Kec. Busungbiu
Maksud	:	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Bonagung
Bentuk fisik	:	Pura pucak
Pengelola	:	Warga masyarakat Banjar Dinas Bonagung
Kondisi monument	:	Baik
Sumber data	:	Sesepuh / pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Pelapuan

MONUMEN DESA PANGKUNG PARUK

Diresmikan	:	Tahun 1935
Lokasi	:	Banjar Dinas Yeh Selem, Desa Pangkungparuk Kec. Seririt
Maksud	:	Mengenang perjuangan di Desa Pangkungparuk
Bentuk fisik	:	Pelinggih
Pengelola	:	Pemerintah Desa Pangkungparuk
Kondisi monument	:	Cukup Baik
Sumber data	:	LVRI anak ranting Desa Pangkungparuk
Keterangan monument	:	Tempat penyingkiran

MONUMEN PAN JANJI

Diresmikan	:	01 Januari 1993
Lokasi	:	Br. Dinas Dangin Margi, Desa Tunjung Kec. Kubutambahan
Maksud	:	Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Segi empat, 3 x 3 Mtr
Pengelola	:	Pemerintah Desa Tunjung / LVRI anak ranting Desa Tunjung
Kondisi monument	:	Setengah Rusak
Sumber data	:	Pelaku pejuang kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang para pejuang yang gugur: 1. Pan Janji 2. Moyo

MONUMEN NYOMAN RUMADA

Diresmikan	:	17 Agustus 2014
Lokasi	:	Desa Tamblang Kec. Kubutambahan
Maksud	:	Mengenang para pejuang yang gugur
Bentuk fisik	:	Patung
Pengelola	:	Pemerintah Desa Tamblang
Kondisi monument	:	Cukup baik
Sumber data	:	Sesepuh/pelaku perjuangan kemerdekaan
Keterangan monument	:	Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Tamblang yang gugur

MONUMEN STHANA WIRA YUDHA

Diresmikan	:	19 Maret 2003
Lokasi	:	Desa Depeha Kec. Kubutambahan
Maksud	:	Untuk mengenang perjuangan di Munduk Ngandang Desa Depeha
Bentuk fisik	:	3 x 3 Mtr (Persegi)
Pengelola	:	Pemerintah Desa Depeha

Kondisi monument : Sedikit Rusak
Sumber data : LVRI anak ranting Desa Depeha
Keterangan monument : Mengenang para pejuang yang gugur:
1. I Gede Ngurah
2. I Wayan Gina

MONUMEN GIRI SATRYA YUDHA BHAKTI

Diresmikan : 24 Januari 2016
Lokasi : Banjar Dinas Kawanan, Desa Bontihing Kec. Kubutambahan
Maksud : Mengenang para pejuang
Bentuk fisik : Tugu
Pengelola : Pemerintah Desa
Kondisi monument : Baik
Sumber data : LVRI anak ranting Desa Bontihing dan Pemerintah Desa Bontihing
Keterangan monument : Mengenang sejarah perjuangan masyarakat Desa Bontihing tanggal 17 Agustus 1946, yang gugur:
1. Lettu Jedeng
2. Pan Liadi
3. Wayan Turun

MONUMEN ISTA YUDHA PAHALA

Diresmikan : 10 Januari 2001
Lokasi : Desa Penuktukan (Kecamatan Tejakula - Buleleng)
Maksud : Perjuangan tak pernah sirna
Bentuk fisik : Patung Obor dan pejuang
Pengelola : Desa / swadaya masyarakat
Kondisi monument : Baik
Sumber data : Wayan Suwanda / Pelaku Sejarah
Keterangan monument : Luas 2 are.
1. 15 Desember 1945 : Tentara Jepang menangkap Shodanco N.

			Melaya sebagai salah satu penggerak upaya perebutan senjata di Tangsi Jepang - Banyumala Singaraja 13 Desember 1945
	2.	22 Mei 1946	: Nica mengurung dan membakar beberapa rumah markas pemuda pimpinan Shodanco N. Malaya gugur 1 orang: Nengah Nagi

MONUMEN DHARMA YUDHA MANDALA

Diresmikan	:	30 April 1992
Lokasi	:	Desa Bondalem (Kecamatan Tejakula - Buleleng)
Maksud	:	Melestarikan jasa para pejuang
Bentuk fisik	:	Patung Pejuang
Pengelola	:	Veteran Kecamatan Tejakula
Kondisi monumen	:	Baik dan perlu ditata lagi
Sumber data	:	Hartawan Mataram
Keterangan monumen	:	Luas 20 are, didirikan swadaya masyarakat. Memperingati pertempuran 1 Mei 1946 antara pejuang se-Kecamatan Tejakula melawan NICA dan AP, gugur 29 orang pejuang.

BAB VI
PENUTUP

Secara umum upaya-upaya yang telah dlaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah dengan melaksanakan beberapa program pembinaan melalui bimbingan sosial mental, pelatihan keterampilan usaha, serta pemberian bantuan perlindungan dan jaminan sosial sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan secara terintegrasi lintas sektor dengan berbagai SKPD.

Kami menyadari, bahwa apa yang kami tampilkan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu agar Buku Profil ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentu sumbang saran maupun kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.

Sekian dan terima kasih.

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1. ANAK BALITA TERLANTAR
2. ANAK TERLANTAR
3. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
4. ANAK JALANAN
5. ANAK DENGAN KEDISABILITASAN
6. ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH
7. ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
8. LANJUT USIA TERLANTAR
9. PENYANDANG DISABILITAS
10. TUNA SUSILA
11. GELANDANGAN
12. PENGEMIS
13. PEMULUNG
14. KELOMPOK MINORITAS
15. BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN
16. ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)
17. KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
18. KORBAN TRAFFICKING
19. KORBAN TINDAK KEKERASAN
20. PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL
21. KORBAN BENCANA ALAM
22. KORBAN BENCANA SOSIAL
23. PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI
24. FAKIR MISKIN
25. KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS
26. KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1. PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL
2. PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
3. TARUNA SIAGA BENCANA
4. LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. KARANG TARUNA
6. LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
7. KELUARGA PIONIR
8. WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL
9. WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
10. PENYULUH SOSIAL
11. TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
12. DUNIA USAHA YANG MELAKUKAN UKS